

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERAN INTERNAL
AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KESUKSESAN
PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**

(Studi Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara)

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Akuntansi (M.Ak) Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

Oleh :

Siti Irafah

NPM : 1720050006

Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DENGAN KESUKSESAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**
(Stusy Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara)

ABSTRAK

**SITI IRAFAH
172005006**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM dan peran internal audit terhadap kesuksesan penerapan SIKD secara parsial dan simultan, (2) menguji dan menganalisis kompetensi SDM dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan (3) menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM dan Peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan melalui kesuksesan penerapan SIKD.

Objek penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-sumatera utara. Sampel pada penelitian ini adalah 34 (tiga puluh delapan). Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah path analysis dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kompetensi SDM dan peran internal audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap kesuksesan penerapan SIKD (2) Kompetensi SDM, Peran Internal Audit tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kesuksesan Penerapan SIKD (3) kompetensi SDM dan peran internal audit berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan (4) Kesuksesan Penerapan SIKD tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (5) Kompetensi SDM, Peran internal Audit, kesuksesan penerapan SIKD berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan (6) Kompetensi SDM dan Peran internal Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah.

Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan.

**THE EFFECT OF COMPETENCE OF HUMAN RESOURCES AND THE
INTERNAL AUDIT ROLE OF THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS
WITH SUCCESS OF APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS
REGIONAL FINANCE AS
INTERVENING VARIABLES
(Stusy in the Provincial and Regency / City Governments of North Sumatra)**

ABSTRACT

**SITI IRAFAH
172005006**

Research this aiming to (1) test and analyze influence competence Human Resources and the internal audit role towards the success of implementing SIKD partially and simultaneously, (2) testing and analyzing Human Resources competencies and the role of internal audit on the quality of financial statements partially and simultaneously (3) testing and analyzing the effect of Human Resources competencies and the role of internal audit on the quality of financial statements through the successful implementation of SIKD.

Object research this is all provincial and district / city - northern Sumatra. Sampel on research this is 34 (thirty four) . Data collection is done with way method questionnaire, documentation and interview. Method The analysis is path analysis by using the SPSS program.

Results research this to show that (1) Human Resources competencies and the role of internal audit don't partially affect the success of the application of SIKD (2) Human Resources competencies, Internal Audit Roles have no effect simultaneously to Success Application SIKD (3) the competence of human resources and the role of internal audit partial effect on the quality of the report financial (4) Successful Implementation of SIKD no effect toward Quality of Financial Statements (5) Human Resources Competency, Role of Internal Audit, the successful implementation of SIKD influence simultaneously toward financial report quality (6) Human Resources competencies and internal audit roles don't influence the quality of financial statements through the successful application of regional financial information systems.

Keyword : Human Resource Competence , Role of Internal Audit ,Success in Implementing Regional Financial Information Systems, Quality of Financial Statements.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian tesis ini dengan judul ***“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Study kasus pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota Se-Provinsi Sumatera Utara)”***. Penelitian tesis ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir dan syarat dalam penyelesaian pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik pada Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan laporan hasil penelitian ini penulis sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian penulis sudah berusaha agar tesis ini sempurna sesuai dengan yang diharapkan dan penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang ikut terlibat dalam membantu selesainya penelitian ini.

Dalam menyelesaikan tesis ini tidak berwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Almarhum Ayahanda Zhon Marpaung dan Almarhumah Ibunda tercinta Julita Sitorus yang tak pernah letih mengasuh, membesarkan, memberikan kasih sayang dan cinta yang tiada ternilai untuk penulis, beserta saudara dan saudari serta sepupu yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan hasil penelitian tesis ini.
2. Suami tercinta Briptu Kaharuddinnur Hasibuan, S.H. yang sudah banyak memberikan bantuan serta perhatian yang tak terhitung kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis ini.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan merangkap sebagai Ketua Komisi Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam laporan hasil penelitian thesis ini.
6. Bapak Dr. Muhyarsyah S.E., M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam laporan hasil penelitian thesis ini.
7. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan merangkap sebagai Pembanding yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam laporan hasil penelitian thesis ini.
8. Bapak Dr. Irfan, S.E., M.M. selaku Pembanding yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam laporan hasil penelitian thesis ini.
9. Ibu Dahrani, S.E., M.Si selaku dosen yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam laporan hasil penelitian ini.
10. Seluruh staff Pengajar dan Staff Administrasi di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Teman-teman di Angkatan 2017 Magister Akuntansi, khususnya Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik yang terus memberi semangat serta bantuan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian thesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penulisan hasil penelitian tesis ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia dan akhirat. Amiin.

Medan, Maret 2019
Penulis

SITI IRAFAH
1720050006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Manfaat Penelitian.....	19
E. Keaslian Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Uraian Teori.....	22
1. Kualitas Laporan Keuangan.....	22
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	35
3. Peran Internal Audit.....	43
4. Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	53
B. Penelitian Terdahulu.....	63
C. Kerangka Konseptual.....	66
D. Hipotesis.....	74

BAB III METODE PENELITIAN.....	76
A. Pendekatan Penelitian.....	76
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	76
C. Populasi dan Sampel.....	77
D. Defenisi Operasional Variabel	78
E. Teknik Pengumpulan data	80
F. Teknik Analisis Data.....	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Hasil Penelitian.....	91
B. Pembahasan	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1	Perkembangan opini LKP Sumut tahun 2014-20176
Tabel I-2	Rekapitulasi hasil temuan BPK-RI 11
Tabel I-3	Perkembangan hasil temuan BPK-RI 14
Tabel II-1	Batas waktu penyampaian IKD57
Tabel II-2	Peneletian Terdahulu 64
Tabel III-1	Tempat Penelitian 76
Tabel III-2	Waktu penelitian 77
Tabel III-3	Defenisi Operasional Variabel 78
Tabel III-4	Bobot Sakal Likert80
Tabel III-5	Hasil uji validtas variabel Kompetensi sumber daya manusia..... 81
Tabel III-6	Hasil uji validitas variabel peran internal audit 81
Tabel III-7	Hasil uji validitas variabel Kesuksesan Penerapan SIKD 82
Tabel III-8	Hasil uji validitas variabel Kualitas laporan keuangan.....82
Tabel III-9	Hasil uji reabilitas83
Tabel III-10	Rumusan pengaruh langsung, tidak langsung, total x1, x2, y1.....87
Tabel III-11	Rumusan pengaruh langsung, tidak langsung, total x1, x2, y1, y289
Tabel IV-1	Pemkab dan Pemprov sumut..... 91
Tabel IV-2	rekapitulasi tingkat pengembalian kuesioner 92
Tabel IV-3	karakteristik responden 93
Tabel IV-4	Skor tanggapan responden 95
Tabel IV-5	Hasil Statistik Deskriptif Variabel kompetensi SDM..... 95
Tabel IV.6 audit 97	Hasil Statistik Deskriptif Variabel peran internal
Tabel IV-7	Hasil Statistik Deskriptif Variabel kualitas laporan keuangan 99

Tabel IV-8	Hasil Statistik Deskriptif Variabel kesuksesan penerapan SIKD .	102
Tabel IV-9	Statistik deskriptif	106
Tabel IV-10	Analisis jalur Rsquare sub struktur 1	106
Tabel IV-11	Analisis jalur coeficient sub struktur 1	107
Tabel IV-12	Hasil pengaruh langsung, tidak langsung, total x1, x2, y1	108
Tabel IV-13	Analisis jalur Rsquare sub struktur 2	109
Tabel IV-14	Analisis jalur coefient sub struktur 2	109
Tabel IV-15	hasil pengaruh langsung, tidak langsung, total x1, x2, y1, y2	111
Tabel IV-16	Uji t regresi sub struktur 1	113
Tabel IV-17	Uji t regresi sub struktur 2	113
Tabel IV-18	Uji f regresi sub struktur 1	114
Tabel IV-19	Uji f regresi sub struktur 2	115

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik I-1	Opini selurh LKPD Tahun 2017 4
Grafik I-2	Perkembangan seluruh LKPD tahun 2014-2017 5
Grafik IV-1	Grafik normal 105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1	Delone and McLean is succes model (1992) 61
Gambar II-2	Delone and McLean is succes model (2003) 61
Gambar II-3	Kerangka Konseptual 74
Gambar III-1	Hubungan struktural antar variabel 85
Gambar III-2	Hubungan struktural sub struktur 1 86
Gambar III-2	Hubungan struktural sub struktur 2 88
Gambar IV-1	Hubungan struktural sub struktur 1 107
Gambar IV-2	Hubungan struktural sub struktur 2 110
Gambar IV-3	Hubungan struktural x_1, x_2, y_1 dan y_2 112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam era reformasi sektor publik dewasa ini adalah menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik dari semua aktivitas birokrasi sampai tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Karena pada prinsipnya pemerintah yang sumber pendanaannya dari masyarakat yang kemudian aktivitasnya untuk kepentingan publik wajib transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan tuntutan reformasi, Pemerintah dan DPR-RI telah mengeluarkan UU Nomor 22 tahun 1999 (diganti UU No. 32/ 2004) tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 (diganti UU No.33/ 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan harus berkualitas sehingga

bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut memiliki nilai. Nilai tersebut diantaranya adalah Kualitas (Arfianti, 2011) dalam (Nazaruddin, 2017).

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas harus memenuhi standart akuntansi, yang mempunyai kualitas andal dan relevan. Dengan demikian informasi pada laporan keuangan mempunyai nilai manfaat bagi pembacanya. Selain itu, perlakuan yang sama terhadap pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan akan membuat informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan. Standart akuntansi juga akan menjadi kriteria untuk menilai performa kinerja keuangan pemerintah.

Kualitas merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid sedangkan ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi itu kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu harus memenuhi karakteristik kualitatif. Di dalam PP No. 71 tahun 2010 disebutkan bahwa karakteristik laporan keuangan yaitu : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Bentuk laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kepemerintahan setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

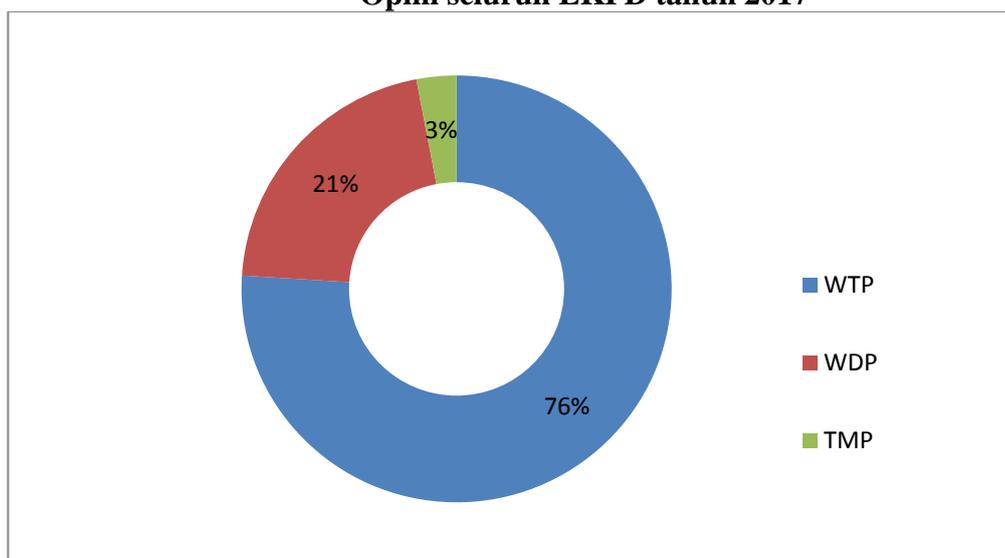
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah, terdapat lima jenis opini yang diberikan oleh BPK RI yaitu : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (disclaimer of opinion). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas, karena opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Opini yang diberikan atas laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan Anggaran yang diberikan pemerintah. Adanya perubahan peningkatan opini laporan keuangan pemerintah, misalnya dari WDP ke WTP secara umum telah menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang berlaku. Upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan juga sejalan dengan (Inpres No 4 Tahun 2011, 2011) tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

Berdasarkan laporan BPK-RI pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2018, hasil pemeriksaan BPK untuk seluruh LKPD di Indonesia

yang terdiri dari 542 LKPD pada Tahun 2017 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 411 (76%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 113 (21%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 18 (3%) LKPD seperti terlihat dalam Grafik 1.1.

Grafik I-1
Opini seluruh LKPD tahun 2017

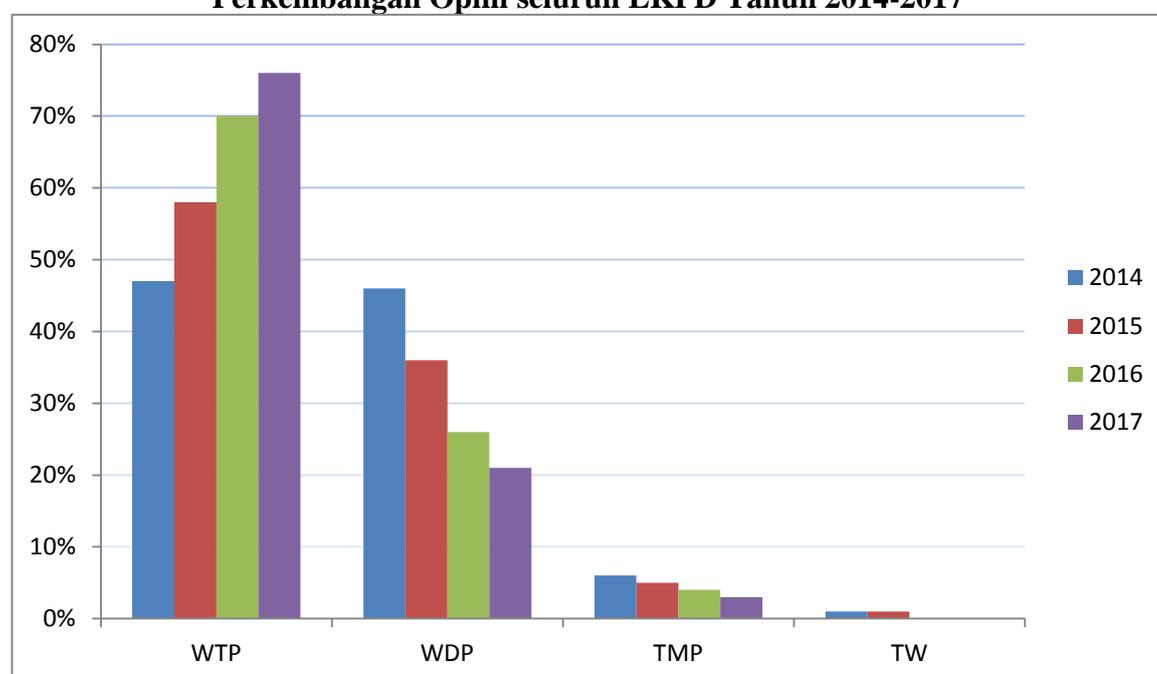


Sumber : (*Badan Pemeriksaan Keuangan RI, 2018*)

Berdasarkan grafik diatas, jika dibandingkan dengan pencapaian opini pada tahun 2016, kualitas LKPD Tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 6 poin persen yaitu dari 70% pada LKPD Tahun 2016 menjadi 76% pada LKPD Tahun 2017. Pada LKPD Tahun 2016, sebanyak 378 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (70%), sedangkan pada LKPD Tahun 2017 sebanyak 411 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (76%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP sebanyak 7 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP sebanyak 45 LKPD.

Jika dilihat dalam 4 tahun terakhir (2014-2017), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 29 poin persen, yaitu dari 47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 76% pada LKPD Tahun 2017. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 3 poin persen dari 6% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 3% pada LKPD Tahun 2017. Perkembangan opini selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik I-2 di bawah ini.

Grafik I-2
Perkembangan Opini seluruh LKPD Tahun 2014-2017



Sumber : (Badan Pemeriksaan Keuangan RI, 2018)

Jika dilihat secara umum, memang pada tahun 2017 terjadi peningkatan atas opini yang dicapai dibandingkan tahun 2016, akan tetapi jika di lihat secara khusus, untuk LKPD Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara masih terlihat prihatin, dikarenakan dari tahun 2014 -2017 opini WDP lebih banyak diraih oleh Kabupaten/kota dibandingkan opini WTP, bahkan masih ada kabupaten yang memperoleh opini TMP dalam 4 tahun berturut-turut. Inilah

alasan peneliti mengambil objek penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, karena berdasarkan data pada IHPS I Tahun 2018 dari tahun 2014-2017 opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara masih banyak yang memperoleh WDP, ada juga beberapa kabupaten dan kota yang mengalami penurunan opini dari WTP ke WDP, dari WDP ke TMP, dan ada juga kabupaten yang memperoleh opini TMP selama 4 tahun berturut-turut. Perolehan TMP 4 tahun berturut-turut ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan atau peningkatan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota pada beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan opini dapat dilihat pada tabel 1.1. dibawah ini.

Tabel I-1
Perkembangan Opini LKPD Prov.SUMUT tahun 2014-2017

Opini	2014	2015	2016	2017
WTP	9	6	12	14
WTP DPP	7	0	0	0
WDP	15	24	18	17
TMP	3	4	4	3

Sumber : *Data di Olah dari IHPS I 2018 (BPK-RI)*

Berdasarkan tabel diatas bahwa kualitas opini LKPD di Provinsi Sumatera Utara terus meningkat. Pada tahun 2014 opini WTP diraih oleh 9 kab/kota, pada tahun 2015 peraih opini WTP mengalami penurunan dari 9 kab/kota menjadi 6 kab/kota, pada tahun 2016 opini WTP kembali naik menjadi 12 kab/kota dan pada tahun 2017 peraih opini WTP kembali meningkat dua angka dari 12 kab/kota menjadi 14 kab/kota. Peraih opini WTP dalam empat tahun terakhir dari tahun

2014 ke tahun 2017 mengalami peningkatan dan penurunan, kendati demikian jika dilihat dan diperhatikan lebih rinci pada tabel 1.2, setiap tahunnya perolehan opini WDP dari tahun 2014 sampai tahun 2017 tetap lebih tinggi dibandingkan dengan opini-opini yang lainnya. Opini TMP juga masih tetap diberikan untuk beberapa kab/kota di Provinsi Sumatera Utara. Tingginya perolehan opini WDP dan juga masih adanya opini TMP untuk beberapa LKPD di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perlunya pemerintah daerah Sumatera Utara untuk lebih mengoptimalkan upaya laporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah melakukan reformasi keuangan negara melalui paket Undang-Undang di bidang keuangan negara agar terlaksananya reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik. Pada tahun 2005, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Seiring dengan terbitnya PP ini, dimulailah babak baru dalam perjalanan sejarah akuntabilitas dan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai standart akuntansi yang menjadi rujukan bagi setiap unit pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP, maka dalam proses pengimplementasian SAP harus didukung dengan adanya serangkaian prosedur secara manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dikerjakan oleh para Aparatur Sipil Negara. Serangkaian prosedur tersebut dikenal dengan nama sistem akuntansi.

Salah satu sistem Informasi akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah Sistem Akuntansi berbasis Akrua. Pada tahun 2010 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 untuk menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua, peraturan ini dibuat guna untuk menciptakan keseragaman secara nasional dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat memperkecil perbedaan sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengkonsolidasian data.

Dalam proses penerapan akuntansi berbasis akrua, banyak kesulitan yang ditemui oleh pemerintah sehingga penerapannya mengalami keterlambatan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memahami akuntansi pemerintahan pada SKPD mengakibatkan lambatnya pengembangan sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Ditambah pula pemerintah daerah belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi sehingga memperlambat penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrua pada pemerintah daerah (KemenKeu, 2018 : 112).

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah menetapkan sistem akuntansi berbasis akrua untuk seluruh pemerintah pusat dan daerah. Dalam kesuksesan penerapan Akuntansi berbasis akrua, Sumber Daya Manusia merupakan salah satu tantangan yang wajib diperhatikan. SDM yang berkompeten merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrua. Melalui program integrasi sosialisasi/training diharapkan pemangku kepentingan memahami dan mendukung penerapan basis

akuntansi akrual dan bersama-sama mengupayakan peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat terwujud. (KemenKeu, 2018:84).

Dikutip dari laporan wartawan Bangka pos (Nordin) 10/10/2018 “Guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, Pemkab Bangka Barat melalui Badan Kepegawaian pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mengadakan pelatihan akuntansi berbasis akrual kepada para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan pelatihan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 10-13 April 2018. Bupati pemkab Bangka Barat berharap pelatihan ini nantinya akan melahirkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan memahami penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi pemerintah yang handal untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas.

Menurut Roviyantie (2011) dalam Rahmadani (2015).Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya harus dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi.Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompoten untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.Begitu juga entitas pemerintah, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan berkompoten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintah.

Seperti dijelaskan (Wahyono, 2004) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai/andal, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumber daya yang menghasilkannya. Informasi harus dapat

dipahami sebagai salah satu indikator kualitasnya informasi. Mudah dipahami disini menyangkut Sumber Daya Manusia yang menghasilkannya. Didalam (Keputusan Kepala BKN No 46 A Tahun 2003, n.d.) tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompetendalam menggunakan sistem, maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002: 146).

Juga sebaliknya, jika penyampaian laporan keuangan tidak tepat waktu maka itu menandakan kurangnya pemahaman SDM dalam menggunakan sistem. Terlambatnya penyampaian laporan keuangan kepada BPK-RI disebabkan oleh dua hal yaitu, kurang berlatihnya nya Sumber Daya Manusia menggunakan sistem informasi keuangan dan lemahnya sistem pengendalian intern. Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi,

informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan (Bodnar dan Hopwood, 2007) dalam (Silviana, 2014).

Berdasarkan penuturan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni menyatakan untuk yang paling cepat adalah kota Pematang Siantar tanggal penyerahan LKPD TA 2017 pada tanggal 28 Feb 2018 dari total 34 Kabupaten / kota di Sumut, lalu disusul oleh Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Humbang Hasundutan dan seperti penyerahan laporan keuangan tahun sebelumnya kota Medan, Kabupaten Padang Lawas dan Mandailing Natal menjadi kabupaten dan kota terlambat.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK RI merupakan pelanggaran PP No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 297 ayat (1) yang berbunyi laporan keuangan disampaikan oleh Gubernur /Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berikut adalah daftar jumlah temuan kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan yang mencakup tentang masalah proses penyusunan serta keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Tabel I-2
Rekapitulasi hasil temuan BPK-RI
Berkaitan dengan kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan

Kelemahan sistem informasi dan pelaporan	2014	2015	2016	2017
Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat	985	978	813	800
Proses penyusunan tidak sesuai ketentuan	927	930	941	938
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang	53	65	51	41

memadai&Entitas terlambat menyerahkan laporan				
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	257	380	351	304
Jumlah	2.222	2.353	2.156	2.083

Berdasarkan tabel I-2 di atas, jelas terlihat banyak nya jumlah temuan masalah dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Kenaikan jumlah temuan ditunjukkan pada tahun 2014 dengan jumlah temuan 2.222 naik menjadi 2.353 pada tahun 2015, walaupun dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami jumlah penurunan temuan masalah, penerapan sistem informasi akuntansi tetap mendapati temuan masalah.

Terkait temuan masalah kelemahan pada sistem informasi akuntansi di atas, menunjukkan kurang berkompeten nya sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan audit intern terhadap sistem pengendalian intern.

Internal Audit juga salah satu bagian yang sangat berpengaruh dalam penerapan suatu sistem. Auditor internal memainkan peran penting dalam pengembangan sistem, terutama dalam perusahaan yang penggunanya tidak memiliki keahlian yang memadai (James A. Hall & Tommie :2007). Internal audit merupakan departemen/divisi yang sudah mengetahui peraturan/SOP yang berlaku pada suatu instansi, sehingga auditor dapat mengawasi sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam sebuah kantor/instansi. Auditor Internal yang paham mengenai teknologi akan mengetahui apa yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem sehingga sistem tidak dapat digunakan untuk

memanipulasi data, dengan demikian proses penyusunan laporan keuangan akan berjalan lancar.

Terkait dengan temuan masalah pada sistem informasi di atas, menunjukkan bahwa audit intern memiliki peran penting didalam untuk mencapai laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, 2008) tentang SPIP. Dengan adanya auditor internal (pemeriksaan/pengawasan intern) maka segala kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh suatu organisasi akan berjalan dengan efisien dan efektif.

Seperti dijelaskan dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, 2008) pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hiro Tugiman (2009:10) menjelaskan ruang lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektifitas Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Guy (2002:410) juga menjelaskan ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektifitas Sistem Pengendalian Internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan.

Mulyadi (2008:177) menyatakan bahwa keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya pengendalian intern akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan. Menurut Mulyadi (2002:29)

audit intern juga memiliki tugas untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi.

Jika pengendalian intern akuntansi dirancang dan diterapkan dengan baik oleh manajemen di dalam pengelolaan organisasinya, maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan akan terjamin ketelitian dan keandalan. Sistem pengendalian intern yang lemah akan mengakibatkan kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan tidak andal, efisiensi tidak terjamin dan kebijakan manajemen tidak dapat dipatuhi.

Berdasarkan data dari BPK-RI dalam Ikhtisar Hasil Laporan Semester (IHPS) I 2018. Berikut perkembangan hasil temuan permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern selama empat tahun terakhir perhatikan tabel 1.2. dibawah ini.

Tabel I-3
Perkembangan Hasil Temuan BPK atas Kelemahan SPI

No	Kelompok Permasalahan	2014	2015	2016	2017
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Belanja	2.598	2.450	2.657	2.887
2	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.158	1.347	1.240	1.252
	Jumlah	3.756	3.797	3.897	4.139

Sumber : *IHPS I 2018 (BPK RI)*

Selain dilihat dari temuan masalah di sistem informasi dan akuntansi, ada nya temuan masalah SPI dalam kelemahan Sistem pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Belanja dan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dengan jumlah temuan pada tahun 2014 sebanyak 3.756 temuan kemudian meningkat menjadi 3.797 temuan, jika dilihat dan pada tahun 2016 jumlah temuan juga terus mengalami peningkatan menjadi 3.897 dan meningkat kembali lagi pada tahun 2017 menjadi 4.139 temuan permasalahan. Ada nya temuan masalah setiap tahun nya dikarenakan lemahnya pengawasan intern terhadap Sistem Pengendalian Intern. Hal ini dijelaskan oleh Sukrisno Agoes (2006:11) untuk mencapai tujuan perusahaan maka internal auditor harus melakukan beberapa kegiatan dan salah satu nya adalah menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian Intern (SPI), dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa auditor internal bertugas mengawasi SPI yang ada dalam sebuah organisasi, jika masih ada temuan tentang SPI dalam laporan keuangan maka itu menunjukkan auditor kurang berperan dalam mengawasi SPI untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 3 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian (Septiana, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawalunto menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian (Nazaruddin dan Syahrial, 2017) yang berjudul Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Lhoksumawe menunjukkan peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Penelitian (Akhmad Syarifudin, 2014) yang “berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Kebumen” menunjukkan bahwa Peran Audit Intern berpengaruh signifikan terhadap SPIP sehingga semakin baik Peran Audit Intern maka penerapan SPIP semakin efektif.

Penelitian (Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, 2014) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah menunjukkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, penulis ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD dengan judul *“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Study kasus pada Pemerintah Provinsi dan Kab/kota Se-Sumatera Utara)”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Adanya Sumber Daya Manusia yang tidak berkompeten dalam menggunakan Sistem Informasi Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.
2. Banyaknya jumlah pemberian opini WDP oleh BPK-RI dari pada opini WTP terhadap LKPD Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Meningkatnya temuan masalah pada Sistem Pengendalian Intern.
4. Masih tingginya Angka temuan pada Kelemahan Sistem Informasi dan Akuntansi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah?

2. Apakah Peran Internal Audit berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan?
5. Apakah Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan?
6. Apakah Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan?
7. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
8. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kesuksesan penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
2. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap kesuksesan penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan keuangan.
5. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
6. Pengaruh Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan keuangan.
7. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
8. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti, penelitian ini bagi penulis juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta lebih mendalami dan memahami lagi mengenai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Kampus Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan di bidang pemerintahan, khususnya pengaruh

kompetensi SDM dan Peran Internal Audit Terhadap terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui arti pentingnya kompetensi SDM dan Peran Internal Audit terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Eka Nurmala Sari (2015) yang meneliti “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Budaya Organisasi, Kompetensi dan Komitmen Organisasional Terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Sumatera Utara). Perbedaan dengan penelitian ini adalah terlihat pada variabel bebas nya dan alat yang digunakan untuk menguji data, penelitian sebelumnya menggunakan Sem Amos, sedangkan penelitian ini menggunakan SPSS.
2. Akhmad Syarifudin (2014) yang meneliti “Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa Variabel Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD tetapi kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap SPIP, sedangkan SPIP berpengaruh signifikan terhadap Kualitas LKPD. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terlihat pada objek dan variabel intervening yang digunakan oleh penelitian sebelumnya.

3. Lola Septiana (2017) yang meneliti “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawalunto). Hasil penelitian ini menyimpulkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Peran Audit Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terlihat pada t peneliti dan penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel intervening.

Berdasarkan uraian diatas, walaupun sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan, namun tetap berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dengan demikian, maka topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini benar-benar asli tanpa plagiat dari penelitian manapun.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Kualitas Laporan Keuangan

a. Defenisi Kualitas Laporan Keuangan

Pengertian kualitas menurut Imam Mulyana (2010:96) adalah: “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”. Laporan keuangan menurut Mahmudi (2003:77) “merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:7):

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Adapun definisi laporan keuangan daerah menurut Baridwan (2000: 17) yaitu: “Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan”.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus

pemakaiannya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Menurut Mardiasmo (2001:160) :

Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.

Menurut (Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, n.d.) mengenai Standart Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah laporan keuangan pemerintah yang memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian diatas maka didefinisikan kualitas laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode dan memiliki nilai yang andal sehingga dapat di bandingkan dan dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut.

Menurut (Cohen, 2011) dalam (Eka, 2015) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dikatakan berkualitas tidak harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, akan tetapi harus disertai dengan laporan audit eksternal yang berisi tentang opini atau pendapat terhadap keandalan dan kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Opini audit tersebut memberikan jaminan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standart akuntansi, dan

bahwa posisi keuangan, hasil operasi dan jumlah surplus atau defisit telah disajikan secara wajar dari organisasi yang diaudit. Selain itu laporan audit juga berperan penting sebagai pencegah muncul nya informasi yang berkualitas rendah.

Opini yang diberikan audit BPK-RI kepada instansi pemerintah yang di audit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak membeikan pendapat, dan tidak wajar. Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari lima jenis yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:

- a. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.
- b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
- c. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.

d. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.
- b. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK.
- c. Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
- d. Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- e. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.
- f. Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila:

- a. Bukti kurang cukup
- b. Adanya pembatasan ruang lingkup
- c. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).

Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat ini diberikan apabila:

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
 - b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.
4. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya.

5. Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus memberi

penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.

b. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Komponen Laporan Keuangan pokok dalam Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, yaitu jenis laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atas penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional, yakni laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas, yakni laporan yang menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. 6) Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, tentang SAP. Bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah pada paragraf 35 menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan, Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan apabila:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala

yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal, Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
 - a. Penyajian Jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat Diverifikasi (verifiability), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Karakteristik Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan menurut (IAI, 2012) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat

dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan (relevance)

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa mendatang, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa mendatang dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu.

3. Dapat diandalkan (reliability)

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat Dibandingkan/Komparabilitas

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

Menurut FASB No.2 mengenai *Qualitative Characteristic of Accounting Information*, terdapat dua hal yang menjadi kualitas primer dalam suatu laporan keuangan, yaitu relevansi (relevance) dan dapat diandalkan (reliability). Informasi Keuangan yang relevan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi penggunaan masa lalu. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan, yaitu memiliki nilai prediktif (predictive value). Informasi yang relevan juga membantu pemakai menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu yaitu memiliki nilai umpan balik (feed back value), dan agar relevan, informasi juga harus tersedia kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (timeless). Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai.

d. Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta

hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity). (SAP No 71 Tahun 2010).

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan SAP Nomor 71 Tahun 2010 :Laporan keuangan merupakan informasi yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

f. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan indikator antara lain :

1. Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang memuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantunya mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat memverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat Dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan

akuntansi yang sama. Perubahan penerapan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Hal ini berarti bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan memungkinkan para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari dua set fenomena ekonomi yang ada.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan. McClelland dalam Rivai (2011:299) dalam (Putriasri, 2017) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang, yang berpengaruh langsung, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik.

Menurut Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 kompetensi adalah:

“Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.”

Menurut Nawawi (2001: 57) sumber daya manusia yaitu: “Manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja, dan lain-lain”. Menurut Fathoni (2006:8) dalam (Asril, 2017) Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Michael Zwell (dalam Wibowo, 2007:102) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan dan Nilai-nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Kepercayaan banyak pekerja bahwa manajemen merupakan musuh yang akan mencegah mereka melakukan inisiatif yang seharusnya dilakukan. Demikian pula apabila manajer merasa bahwa mereka hanya mempunyai sedikit pengaruh, mereka tidak meningkatkan usaha dan energi untuk mengidentifikasi tentang bagaimana mereka harus memperbaiki sesuatu. Untuk itu, setiap orang harus berpikir

positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir ke depan.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik. Dengan memperbaiki keterampilan berbicara di depan umum dan menulis, individu akan meningkatkan kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian terhadap komunikasi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.

4. Karakteristik Kepribadian

Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang merespons dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan

sekitarnya. Kepribadian dapat memengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan.

5. Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi bawahan. Apabila manajer dapat mendorong motivasi pribadi seorang pekerja, kemudian menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis, mereka akan sering menemukan peningkatan penguasaan dalam sejumlah kompetensi yang mempengaruhi kinerja. Kompetensi menyebabkan orientasi pada hasil, kemampuan mempengaruhi orang lain, serta meningkatkan inisiatif. Peningkatan kompetensi akan meningkatkan kinerja bawahan dan kontribusinya pada organisasi akan meningkat.

6. Isu emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer. Mengatasi pengalaman yang tidak menyenangkan akan memperbaiki penguasaan dalam banyak kompetensi.

7. Kemampuan intelektual

Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi.

8. Budaya organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut:

- b. Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan, untuk mempertimbangkan siapa di antara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahliannya tentang kompetensi.
- c. Sistem penghargaan mengkomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.
- d. Praktik pengambilan keputusan mempengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
- e. Filosofi organisasi yaitu menyangkut misi, visi dan nilai-nilai berhubungan dengan kompetensi.
- f. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.
- g. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengkomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan.
- h. Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung mempengaruhi kompetensi kepemimpinan.

b. Manfaat Penggunaan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Ruky (dalam Sutrisno, 2012: 208) mengemukakan bahwa penggunaan konsep kompetensi sumber daya manusia didalam suatu organisasi digunakan atas berbagai alasan, yaitu :

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai.

Dalam model ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar: keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subjektif dalam bidang SDM.

2. Alat seleksi karyawan.

Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi untuk memilih calon karyawan yang terbaik. Dengan kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, perusahaan dapat mengarahkan pada sasaran selektif serta mengurangi biaya rekrutmen yang tidak perlu. Caranya dengan mengembangkan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan wawancara seleksi pada perilaku yang dicari.

3. Memaksimalkan produktivitas.

Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi “ramping” mengharuskan perusahaan untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara vertical maupun horizontal.

4. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi.

Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan yang ditampilkan seorang karyawan.

5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan.

Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baruterus meningkat. Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah.

6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi.

Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

c. Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Spencer (dalam Moeheriono, 2010: 13), beberapa karakteristik kompetensi terdiri dari:

1. Watak (traits), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu, misalnya percaya diri (self-confidence), kontrol diri (self-control), ketabahan atau daya tahan (hardiness).

2. Motif (motive), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
3. Bawaan (self-concept), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu.
5. Keterampilan atau keahlian (skill), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental

Spencer (dalam Moeheriono, 2010: 15) mengemukakan bahwa konsep diri (self-concept), watak (trait), dan motif (motive) cenderung tidak tampak atau tersembunyi. Kompetensi ini dapat menyesuaikan atau diaplikasikan dalam berbagai situasi atau starting qualifications, yang isinya adalah keterampilan sosial dan komunikasi, teknik umum dan situasi berubah-ubah, kualitas organisasional serta pendekatan dasar pekerjaan dan situasi. Sehingga pada akhirnya Spencer mengemukakan bahwa apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di organisasi, karyawan yang kompeten adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan syarat pekerjaan sehingga dapat berpartisipasi aktif di tempat kerja.

d. Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007, indikator kompetensi sumber daya manusia (pegawai) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan umumnya diperoleh seseorang dari pengalaman yang

dimiliki atau diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh seseorang. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dapat membantu mencapai tujuan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan.

2. Keterampilan, yaitu kecakapan seseorang untuk mampu menggunakan ide dan pengetahuannya dalam melakukan dan menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Sikap, yaitu respon terhadap tugas yang diberikan. Sikap pegawai yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diberikan dengan segala resikonya.

3. Peran Internal Audit

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) “Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.

Auditor Internal melaksanakan fungsi audit intern seperti yang dijelaskan dalam Standart Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014:3) berikut ini :

Audit intern adalah kegiatan independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Peran auditor internal sebagai quality assurance (penjamin mutu) sangat penting dalam “membantu komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan optimalisasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah” (Standar Audit AAIP, 2014: 3). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa:

APIP (auditor internal) pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri /pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota kepada pihak-pihak terkait. Reviu atas LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP diamanatkan untuk “tugas-tugas audit, reviu, evaluasi, monitoring dan pendampingan”. Pelaksanaan tugas oleh APIP juga dituntut untuk memahami core business setiap OPD yang akan dijadikan sebagai objek penugasan. APIP juga disyaratkan memenuhi kemampuan yang komprehensif bagi seorang auditor dimana selain mampu mendeteksi kelemahan, auditor juga harus mampu memberikan solusi untuk mengatasi kelemahan yang ada. APIP daerah juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan secara memadai bahwa pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah telah diselenggarakan sesuai dengan SAP melalui hasil reviu atas LKPD sebelum diaudit oleh aparat pengawasan eksternal. Perubahan peran APIP sebagaimana yang telah diakomodir dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang juga sekaligus menjadi harapan penting kepada APIP adalah :

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Fungsi auditor internal dilaksanakan oleh APIP dengan mengedepankan kode etik yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

a. Kode Etik Internal Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, prinsip-prinsip perilaku auditor dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur seberapa besar peran auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, antara lain:

1. Integritas, yaitu:
 - b. melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh
 - c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas
 - d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku
 - e. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi
 - f. tidak menjadi bagian kegiatan illegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi
 - g. menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit
 - h. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
2. Obyektivitas, yaitu:
 - a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit
 - b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan
 - c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
3. Kerahasiaan, yaitu:
 - a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit.
 - b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi, yaitu:
 - a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit

- b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan
- c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.

Maksud dan tujuan Kode Etik APIP adalah “tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP”. Tujuan Kode Etik adalah:

- 1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
- 2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya.
- 3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etik, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan audit.

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi:

- 1. Auditor;
- 2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Berdasarkan PER/04/M.PAN/03/2008 pula, Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

- 1. Prinsip-prinsip perilaku auditor, meliputi:
 - a. Integritas; Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
 - b. Objektivitas; Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
 - c. Kerahasiaan; Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Kompetensi; Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Internal Audit

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) :

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya wajar”.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:222) dalam (Eka, 2015) tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan organisasi (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penelitian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.

Dengan kata lain tujuan audit internal dalam sektor publik adalah membantu agar para sumber daya manusia dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga setiap pegawai dapat saling bekerjasama satu sama lain, tujuan pemerintah dapat dicapai dengan mudah dan audit internal dapat menilai dan menyesuaikan pengendalian internal dalam organisasi sektor publik agar sesuai dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat agar pengendalian internal tersebut berjalan efektif dengan biaya yang wajar. Tujuan audit internal mempunyai jangkauan yang luas, pada dasarnya audit internal diarahkan untuk membantu seluruh pegawai dan pimpinan, agar mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam mencapai tujuan organisasi secara hemat, efisien dan efektif. Bantuan ini dilakukan oleh pemeriksa intern dengan cara menyampaikan kepada para pegawai dan pimpinan berbagai analisa, penilaian,

kesimpulan dan rekomendasi mengenai kegiatan yang diperiksa dan konsultasi yang dilakukannya.

Menurut Akmal (2006:5) untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. “Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk pengendalian manajemen pengolahan data elektronik (PDE).
2. Mengidentifikasi dan mengukur risiko
3. Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan rencana, prosedur, peraturan dan perundang-undangan
4. Memastikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aktiva
5. Menentukan tingkat kenadalan informasi
6. Menilai apakah penggunaan sumber daya sudah ekonomis dan efisien serta apakah tujuan organisasi sudah tercapai
7. Mencegah dan mendeteksi kecurangan
8. Memberikan jasa konsultasi”.

Selanjutnya menurut Sawyer’s (2005:10) dalam (Safrida *et. al.*, 2010) menggambarkan lingkup audit internal modern sebagai sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan : apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.

Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006; 99-100) sebagai berikut :

“Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan Pemeriksaan Internal harus :

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipengaruhi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mereview berbagai system yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentuka apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan pengguna berbagai sumber daya.
5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan”.

c. Fungsi Internal Audit

Auditor internal terlibat dalam memenuhi kebutuhan manajemen pemerintahan, dan staff yang paling efektif meletakkan tujuan manajemen dan organisasi di atas rencana dan aktivitas mereka. Tujuan-tujuan audit disesuaikan dengan tujuan manajemen pemerintahan, sehingga audit internal itu sendiri berada dalam posisi untuk menghasilkan nilai tertinggi pada hal-hal yang dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan tujuan pemerintah. Menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Adhariani (2003:32) mengatakan bahwa fungsi auditor internal sebagai berikut :(a) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi oleh manajemen puncak;(b) Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, auditor intenal memperluas persepsi tentang manajemen risiko dan meningkatkan upaya untuk menyakinkan manajemen bahwa semua jenis risiko organisasi telah diperhatikan dengan layak;(c) Menvalidasi laporan ke manajemen

senior; (d) Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis. Auditor internal modern harus mengetahui bagaimana data berawal, bagaimana proses pengelolaannya, dan dimana letak risiko keamanannya. Dengan semakin banyaknya prosedur audit tradisional yang diganti dengan pemrosesan data elektronik, semua auditor membutuhkan paling tidak beberapa tingkat keahlian. Pengamanan data telah menjadi risiko terbesar yang dihadapi oleh organisasi modern.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002: 211) fungsi auditor internal sebagai berikut:

“Fungsi auditor internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi dari pengendalian intern adalah menilai sejauh mana keefektifan suatu instansi yang berfokus pada bagian unit-unit kecil yang ada didalamnya; fungsi internal auditor merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka”.

Diartikan bahwa fungsi audit internal meliputi kegiatan pemeriksaan dan segala kegiatan yang tahapannya tidak terbatas pada bagian keuangan saja. Auditor internal juga mencakup penyelesaian masalah jika terdapat ketidaksesuaian didalamnya, melalui rekomendasi-rekomendasi yang membangun. Peranan auditor internal melaksanakan audit keuangan maupun audit investigasi terhadap kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah dan hasil audit maupun investigasi tersebut disampaikan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait. Pengawasan yang dilaksanakan auditor internal pemerintah diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, ketidaksesuaian

prosedur dan indikasi penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pada pemimpin penyelenggara pemerintahan tersebut.

d. Standart Profesional Auditor Internal

Penerapan standar profesi perlu diatur dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat unit audit internal melaksanakan kewajiban yang ditugaskan kepadanya. Kesesuaian dengan konsep-konsep yang telah dinyatakan dalam standar ini sangat penting apabila para auditor internal ingin memenuhi tanggung jawabnya. Hiro Tugiman (2006:13) mengemukakan beberapa kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Independensi, Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa oleh objektivitas para pemeriksa internal (internal auditor). Status organisasi dari unit audit internal haruslah memberi keleluasan dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam rangka memenuhi dan menyelesaikan tugas pemeriksaan yang diberikan kepada unit audit.
2. Kemampuan Profesional Audit Internal, Kemampuan profesional merupakan hal yang wajib dimiliki oleh Auditor internal. Pimpinan auditor internal harus menegaskan orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai agar pemeriksaan berlangsung secara tepat. Fungsi audit internal sebagai pemberi jaminan (assurance) dan konsultan internal (consultant) menurut kemampuan audit internal untuk dapat lebih profesional dalam menjalankan fungsinya.

e. Indikator Peran Internal Audit

Indikator yang digunakan untuk mengukur audit internal adalah diambil dari standart kode etik auditor internal oleh Boyton *et. al.*, (2001) :

1. Integritas (Integrity)
Integritas audit internal membentuk kepercayaan dan karenanya memberikan dasar untuk mengandalkan pertimbangan mereka.
2. Objektivitas (Objectivity)
Audit internal memperlihatkan tingkat objektivitas profesional yang paling tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa.
3. Kerahasiaan (Confidentiality)
Audit internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima serta tidak mengungkapkan informasi tanpa

kewenangan yang tepat kecuali jika ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukan hal itu.

4. Kompetensi (Competency)

Audit internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan jasa audit internal.

Standar etika atau *code of ethics* menurut *Institute of Internal Auditors*

(IIA) yaitu :

1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal, yaitu : Integritas, Objektif, Confidentiality dan Kompetensi
2. Rule of conduct yang melukiskan norma-norma perilaku (behaviour norms) yang diharapkan dari auditor intern. Rule of conduct membantu menginterpretasikan prinsip-prinsip kedalam aplikasi praktis dan bermaksud untuk mengarahkan tingkah laku etis (ethical conduct) dari auditor intern. Berikut Rule of conduct IIA :
 - Integritas,
 - a. Harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, kecermatan, tanggung jawab dan tekun
 - b. Harus mentaati hukum dan melakukan pengungkapan sesuai hukum dan aturan profesi
 - c. Dilarang terlibat dalam aktivitas ilegal atau perbuatan yang mendiskreditkan profesi auditor internal atau organisasi
 - d. Harus menghormati dan berkontribusi terhadap legitimasi dan tujuan etis dari organisasi.
 - Objektif .
 - a. Tidak terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang mengurangi atau berpotensi mengurangi ketidakhiasan penilaian auditor. Keterlibatan semacam ini meliputi aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dari organisasi.
 - b. Tidak menerima segala hal yang dapat mengurangi penilaian profesionalnya
 - c. Harus mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu aktivitas pelaporan yang sedang di review.
 - Confidentiality.
 - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan proteksi terhadap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau mengancam tujuan legitimasi dan etis organisasi
 - Kompetensi.
 - a. Hanya terlibat dalam pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan pengetahuannya
 - b. Melaksanakan tugas sesuai standar profesi audit internal

- c. Harusmeningkatkan kemampuan dan efektivitas kualitas jasa yang diberikan.”

3. Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

a. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon dan Laudon, 2000) dalam (Dwi *et. al.*,2010). Bodnar dan Hopwood (2000) dalam (Dwi *et. al.*,2010) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat.

Menurut Romney *et. al.*, (2012:30) dalam (Silviana, 2017)menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi adalah sebuah pengumpulan data dan prosedur pengolahan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan para pemakainya.

Menurut Abdul Halim (2007:42) Akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, rakyat, analis dan pemerhati pemda, dan pemerintah pusat”.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut pasal 232 ayat (3)

Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu :

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada para pemakai dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Sistem Informasi

Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean dapat diukur dari enam faktor (Delone & McLean, 1992) dalam (Pinta Saras Puspita & Hamzah Ritchi, 2017) yaitu :

1. System quality: ukuran pemrosesan informasi dari suatu sistem itu sendiri.
2. Information quality: ukuran dari keluaran sistem informasi.
3. Use: seberapa sering pengguna menggunakan sistem informasi tersebut.
4. User satisfaction: respon penerima terhadap kegunaan dari keluaran suatu sistem informasi.
5. Individual impact: efek dari sistem informasi pada perilaku penerima.
6. Organizational impact : efek dari informasi pada kinerja organisasi.

DeLone dan McLean pada tahun 2003, memperbaiki serta mengusulkan model yang sudah diperbarui untuk digunakan pada kasus e-commerce. Berikut adalah faktor-faktor pendukung kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) :

1. **Kualitas Sistem (System Quality)** Kualitas sistem mencakup sejauh mana performa yang ditunjukkan oleh sistem ketika user menggunakan sistem informasi, baik dari segi hardware maupun dari segi software. Indikator pengukuran kualitas sistem antara lain adalah kemudahan untuk digunakan (ease of use), fleksibilitas (flexibility), keandalan sistem (reliability), kecepatan akses (response time), dan keamanan sistem (security).
2. **Kualitas Informasi (Information Quality)** Variabel ini menggambarkan kualitas informasi yang diharapkan oleh pengguna ketika memakai sistem. Indikator pengukuran kualitas informasi meliputi ketersediaan/kelengkapan informasi (completeness), kemudahan pemahaman (ease of understanding), penyajian informasi (format), relevansi kebutuhan (relevance), dan keakurasian informasi (accurate).
3. **Kualitas Layanan (Service Quality)** Pengguna sistem informasi mengharapkan pelayanan yang sesuai ekspektasi ketika menggunakan sebuah sistem informasi. Variabel ini menjamin adanya layanan yang diberikan oleh sistem informasi, seperti update dan respon terhadap feedback yang diberikan oleh pengguna. Indikator pengukur kualitas layanan meliputi jaminan sistem (assurance), empati (empathy), dan waktu respon layanan (responsiveness).
4. **Pemakaian (Use)** Variabel ini mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Indikator pengukuran pemakaian meliputi semua hal tentang kebiasaan penggunaan sistem, seperti frequency of use dan nature of use.

5. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) Variabel ini merupakan respon dan tanggapan yang diajukan oleh pengguna setelah memakai sistem informasi. Variabel pengukur kepuasan pengguna adalah efisiensi (efficiency), efektifitas (effectiveness), dan kepuasan menyeluruh (overall satisfaction).
6. Manfaat-Manfaat Bersih (Net Benefits) Variabel ini merupakan dampak keberadaan serta pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna baik secara individu maupun organisasi. Variabel pengukur manfaat-manfaat bersih adalah peningkatan kinerja, efisiensi dan efektifitas, dan produktifitas.

c. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah (PP RI Nomor 56 Tahun 2005: Pasal 1 ayat 15).

Informasi Keuangan Daerah (IKD) adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (IKD)(PP RI No. 56 Tahun 2005: Pasal 1 ayat 16). Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan harus memenuhi prinsip – prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan(PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 3).

Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup :

1. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
2. Neraca Daerah;
3. Laporan Arus Kas;
4. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah;
5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Informasi dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan Informasi yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri adalah dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 2 ayat 2). Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 6). Batas waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Tabel II-1
Tabel batas Waktu penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)

Jenis informasi Keuangan Daerah (IKD)	Keterangan
APBD	31 Januari Tahun Anggaran yang Bersangkutan
APBD Perubahan	30 Hari setelah dtetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan
Realisasi ABD per Semester	30 Hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan
Realisasi APBD	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu
Neraca Daerah	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu
Laporan Arus Kas	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun

	yang lalu
Catatan Atas Laporan Keuangan	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu
Laporan Keuangan Perusahaan Daerah	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu
Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas ficsal daerah	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu

Sumber : PP No 56 Tahun 2005

d. Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaran SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri.SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIPKD Nasional. Pemerintah menyelenggarakan SIPKD secara nasional dengan tujuan :

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

e. Model Kesuksesan Sistem Informasi

Kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi dapat defenisikan sebagai efektifitas dari sistem informasi akuntansi (DeLone dan McLean, 2003;Gelinan dan Wriggin, 1990;Sajady et al, 2008) dalam (Eka, 2015). Efektifitas sistem informasi akuntansi tergantung pada persepsi pengambil keputusan pada

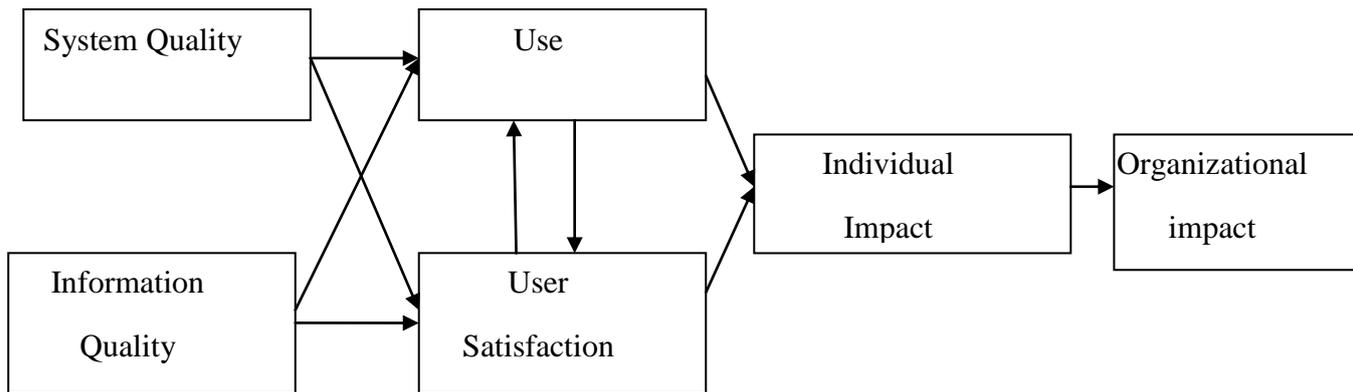
kegunaan informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk proses operasi, laporan manajerial, penganggaran dan kontrol dalam organisasi (Sajadi et al, 2008) dalam (Eka, 2015).

Dalam simposium Nasional Akuntansi 2017 di Makassar menjelaskan proses desain sistem informasi diharapkan dapat berfungsi secara efektif. Keefektifan, menandakan bahwa pengembangan sistem informasi tersebut sukses. Menurut Radityo dan Zulaikha (2007), sebagaimana diakui Laudon dan Laudon (2000), menggambarkan kesuksesan sistem merupakan hal yang sulit. Penggunaan analisis biaya-manfaat tidak dapat dilakukan secara sempurna karena tidak semua manfaat bisa dikuantifikasi. Dalam banyak penelitian (Ives et al., 1983; Bailey dan Pearson, 1983; Doll dan Torkzadeh, 1988; Seddon dan Yiew, 1992; Mahmood et al. 2000; Doll et al. 2004; Livari, 2004; Landrum dan Prybutok, 2004), kesuksesan sistem informasi diprosikan oleh kepuasan pengguna (user satisfaction). Namun, penggunaan kepuasan pengguna sebagai proksi ini mendapat kritik dari Markus dan Keil (1994). Mereka dengan kritis mengungkapkan kepuasan tidak akan bermakna banyak ketika sistem itu tidak menyebabkan peningkatan kinerja individu dan organisasi. Berdasarkan kritik tersebut, Laudon dan Laudon (2000) menentukan 5 variabel untuk mengukur kesuksesan sistem informasi. Variabel-variabel tersebut adalah tingkat penggunaan yang tinggi (high level of system use), kepuasan pengguna terhadap sistem (user satisfaction on system), sikap yang positif (favorable attitude) pengguna terhadap sistem tersebut, tercapainya tujuan sistem informasi (achieved objectives), dan imbal balik keuangan (financial payoff).

Selain Laudon dan Laudon (2000), Model D&M juga dikembangkan oleh DeLone dan McLean pada tahun 1992, merupakan salah satu model untuk menguji kesuksesan sistem informasi. Banyak peneliti yang menguji kesuksesan sistem informasi dengan menggunakan model D&M yang diterapkan di berbagai instansi. Banyak juga peneliti yang memberikan kritikan untuk menguji keakuratan model D&M dalam menggambarkan kesuksesan penerapan sistem informasi. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dikaji oleh DeLone dan McLean, model kesuksesan D&M merupakan suatu model parsimony. Dalam mengkaji ukuran keberhasilan sistem informasi, DeLone dan McLean menyimpulkannya dengan hubungan antara enam variabel keberhasilan sistem. Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean dapat diukur dari enam faktor (DeLone & McLean, 1992) dalam (Pinta Saras Puspita & Hamzah Ritchi, 2017) yaitu :

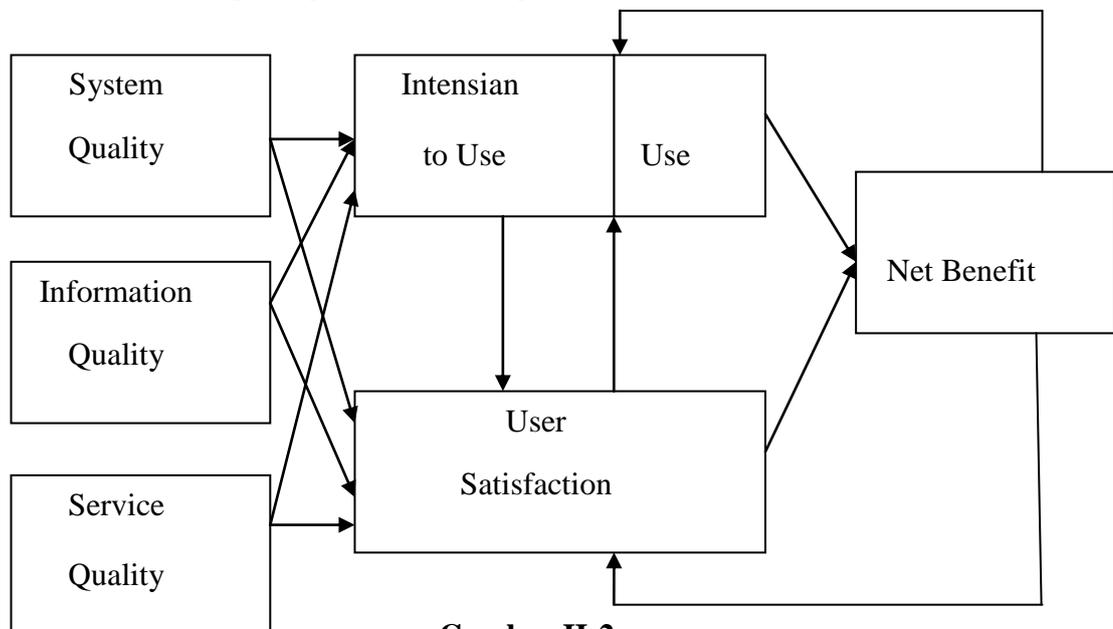
1. System quality: ukuran pemrosesan informasi dari suatu sistem itu sendiri.
2. Information quality: ukuran dari keluaran sistem informasi.
3. Use: seberapa sering pengguna menggunakan sistem informasi tersebut.
4. User satisfaction: respon penerima terhadap kegunaan dari keluaran suatu sistem informasi.
5. Individual impact: efek dari sistem informasi pada perilaku penerima.
6. Organizational impact : efek dari informasi pada kinerja organisasi.

Gambar berikut menjelaskan model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean (1992).



Gambar II-1
DeLone dan McLean IS Succes Model (1992)

DeLone dan McLean melakukan revisi modelnya menjadi model Update Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Pada model yang baru, DeLone dan McLean menambahkan dimensi kualitas layanan (service quality). Selain itu, DeLone dan McLean juga menggabungkan dua dimensi, yakni pengaruh individu dan pengaruh organisasi menjadi dimensi keuntungan bersih (net benefit). Adapun model update kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II-2
Update DeLone dan McLean IS Succes Model (2003)

Maksud dari masing-masing dimensi kesuksesan sistem sebagaimana yang dikemukakan *DeLone dan McLean (2003)* dalam (*Dwi et. al., 2010*) adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sistem (System Quality) merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri. Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi (DeLone dan McLean, 1992).
2. Kualitas informasi (Quality Information) merujuk pada *output* dari sistem informasi, hal ini menyangkut nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi dari informasi yang dihasilkan (Pitt dan Watson, 1997).
3. Kualitas Pelayanan (Service Quality) Tingkat pelayanan sebuah sistem akan terlihat dari frekuensi penggunaan sistem tersebut. Jika sistem banyak digunakan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa orang akan terbantu dengan sistem tersebut.
4. Penggunaan (Use) dalam sistem merupakan suatu perilaku seseorang dalam menggunakan sistem. Penggunaan sistem informasi ini memperlihatkan keputusan penggunaan sistem informasi oleh pengguna dalam menyelesaikan tugas pengguna (Davis, 1989).
5. Kepuasan pengguna (Satisfaction Use) Menurut Seddon dan Kiew (1994), kepuasan pengguna adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan dampak potensial dari sistem informasi.
6. Manfaat Bersih (Net Benefits) Jogiyanto (2007) dampak dari informasi sudah meningkat tidak hanya dampaknya pada pemakai individu dan

organisasi saja, tetapi dampaknya sudah ke grup pemakai, ke antar organisasi, consumer, pemasok, sosial bahkan ke Negara.

f. Indikator Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesuksesan sistem diambil dari yang dikemukakan oleh *DeLone dan McLean (2003)* dalam (*Dwi et. al., 2010*) adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sistem (System Quality) merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri. Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi (DeLone dan McLean, 1992).
2. Kualitas informasi (Quality Information) merujuk pada *output* dari sistem informasi, hal ini menyangkut nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi dari informasi yang dihasilkan (Pitt dan Watson, 1997).
3. Kualitas Pelayanan (Service Quality) Tingkat pelayanan sebuah sistem akan terlihat dari frekuensi penggunaan sistem tersebut. Jika sistem banyak digunakan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa orang akan terbantu dengan sistem tersebut.
4. Penggunaan (Use) dalam sistem merupakan suatu perilaku seseorang dalam menggunakan sistem. Penggunaan sistem informasi ini memperlihatkan keputusan penggunaan sistem informasi oleh pengguna dalam menyelesaikan tugas pengguna (Davis, 1989).

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan gabungan dari variabel-variabel di atas maka berikut penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang variabel-variabel terkait di atas.

Tabel II-2
Peneliti terdahulu

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
Akhmad Sayrifudin (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada PEMKAB Kebumen)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, artinya meningkatnya variasi kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD.
Kadek Desi Triana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinaarwati (2014)	Pengaruh Kompetenasi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
Lilis Setyowati, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran internal audit memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang
Indra Kesuma, Nadirsyah, Darwanis (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Auditor dan Aktivitas Pengendalian Terhadap nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, peran internal auditor dan aktivitas pengendalian mempunyai hubungan yang kuat dengan nilai informasi pelaporan keuangan.
Lola Septiana (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

	Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto)	peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Nazaruddin dan Syahril (2017)	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.
Asril dan M. Yusuf (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
Lisa Amelia Herman dan Daswirman (2017)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh)	Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Payakumbuh.
Nanang Agus Suyono (2016)	Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Keuangan Pemerintah Daerah (Study Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Wonosobo)	pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Silviana (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat	Penerapan SIA berpengaruh terhadap kualitas LKPD

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akan memberikan gambaran terhadap permasalahan penelitian yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka yang relevan dan terkait, serta merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka konseptual dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening.

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sumber Daya Manusia harus dapat mengoperasikan sistem informasi akuntansi atau keuangan daerah yang digunakan untuk menginput, mengolah dan mengoutput data yang disajikan. Jika pegawai atau pekerja tidak berkompeten dalam mengoperasikan suatu sistem, maka laporan yang dihasilkan tidak akan berkualitas.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memahami akuntansi pemerintahan pada SKPD mengakibatkan lambatnya pengembangan sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Ditambah pula pemerintah daerah belum sepenuhnya memanfaatkan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi sehingga memperlambat penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah (KemenKeu, 2018 : 112).

Romney, et.al (2003) dalam (Silviana, 2014) mendefenisikan sistem sebagai suatu kelompok yang terdiri atas komponen-komponen (fungsi, manusia, aktifitas,

dan lain-lain) yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa penelitian untuk mendukung penelitian ini yaitu (Nunuy, 2009) meneliti kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi di Pemerintah Daerah, hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan sistem informasi akuntansi. (Mahdavi dan Funnel, 2003) melakukan penelitian mengenai implementasi SIA pada Republik Islamik Iran, dan hasil penelitian menyatakan sistem informasi pemerintah saat ini belum memadai untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengendalian yang efektif atas dana Pemerintah.

2. Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kesuksesan penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peran Internal Audit memiliki peranan penting dalam mengawasi sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi termasuk juga didalamnya sistem informasi apakah berjalan dengan efektif atau tidak. Agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi berkualitas.

Internal Audit juga salah satu bagian yang sangat berpengaruh dalam penerapan suatu sistem. Auditor internal memainkan peran penting dalam pengembangan sistem, terutama dalam perusahaan yang penggunanya tidak memiliki keahlian yang memadai (James A. Hall & Tommie :2007).

Hal ini didukung oleh penelitian (Indra et. al. 2014) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, peran internal auditor dan aktivitas pengendalian mempunyai hubungan yang kuat dengan nilai informasi pelaporan

keuangan. (Nurbaedah, 2009) dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa peran auditor internal berpengaruh yang signifikan terhadap efektifitas sistem informasi akuntansi.

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit terhadap Kesuksesan penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, Sistem komputer merupakan bagian yang sangat penting sehingga data yang di input oleh Sumber Daya Manusia nya dapat di output dan menjadi sebuah laporan keuangan.

Setelah laporan keuangan tersaji dengan baik, maka Internal audit mengawasi dan memeriksa apakah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan ketentuan Standart Akuntansi Pemerintah.

Dalam proses pemeriksaan dan pengawasan terkadang seorang internal audit membutuhkan sebuah sistem informasi yang digunakan sebagai alat untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang disajikan benar dan dapat dipercaya.

Beberapa penelitian untuk mendukung penelitian ini yaitu (Nunuy, 2009) meneliti kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi di Pemerintah Daerah, hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan sistem informasi akuntansi. Penelitian (Nurbaedah, 2009) dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa peran auditor internal berpengaruh yang signifikan terhadap efektifitas sistem informasi akuntansi.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sumber Daya Manusia yang berkompeten menjadi salah satu faktor berkualitas nya Laporan Keuangan. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Havesi, 2005 dalam Celviana 2010) dalam (Septiana, 2017).

Dalam proses penyiapan dan penyusunan laporan keuangan, pemerintah memerlukan SDM yang berkompeten, menguasai akuntansi pemerintahan (KemenKeu, 2018 : 96).

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, diteliti oleh (Kadek et al, 2015) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan jika kompetensi sumber daya manusia baik maka kualitas laporan keuangan daerah juga akan baik sehingga memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Penelitian (Lilis *et al*, 2016) juga mengatakan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, hal ini dikarenakan kondisi pegawai bagian keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

5. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peran audit internal juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan kualitas laporan keuangan. Alasan nya adalah dengan adanya pengawasan dari internal audit maka akan menghasilkan sistem

pengendalian yang baik sesuai dengan prosedur, dengan adanya SPI maka penyusunan laporan keuangan menjadi berkualitas.

Mulyadi (2008:177) menyatakan bahwa keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya pengendalian intern akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan.

Menurut Mulyadi (2002:29) audit intern juga memiliki tugas untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi.

Hal ini sejalan dengan Penelitian (Lilis *et al*, 2016) juga menyatakan peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD hal ini dikarenakan Adanya peran internal audit akan dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan handal untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD.

6. Pengaruh Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

rangkapereencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (PP Nomor 65 Tahun 2010).

Penerapan Sistem Akuntansi Akruwal pada semua lini pemerintahan baik pusat maupun daerah merupakan wujud untuk mencapai laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pemerintah yang lebih berkualitas (KemenKeu, 2018 : 110).

Beberapa peneliti terdahulu yang mendukung penelitian ini, (Silviana, 2014) menunjukkan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas LKPD dikarenakan SIKD merupakan sistem yang sudah terintegrasi berdasarkan standart akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan.

7. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia merupakan bagian pertama yang harus diperhatikan, karena yang akan menggunakan dan mengoperasikan sistem yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah manusia. Jika Sumber Daya manusia berkompeten dalam mengoperasikan sistem maka proses penyusunan laporan keuangan akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga penyampaian waktu pelaporan keuangan akan tepat waktu.

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah menetapkan sistem akuntansi berbasis akruwal untuk seluruh pemerintah pusat dan daerah. Dalam kesuksesan penerapan Akuntansi berbasis akruwal, Sumber Daya

Manusia merupakan salah satu tantangan yang wajib diperhatikan. SDM yang berkompeten merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Melalui program integrasi sosialisasi/training diharapkan pemangku kepentingan memahami dan mendukung penerapan basis akuntansi akrual dan bersama-sama mengupayakan peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat terwujud. (KemenKeu, 2018 : 84).

Penelitian (Septiana, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawalunto menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

8. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, aktifitas pengawasan yang dilakukan oleh auditor sangat berpengaruh. Internal audit berfungsi untuk mengawasi apakah sistem berjalan sesuai dengan prosedur dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jika sistem berjalan sesuai prosedur ditandai dengan baiknya Sistem Pengendalian Intern dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

Dalam melakukan pengawasan, seorang auditor harus mahir dalam mengoperasikan sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam mengelola

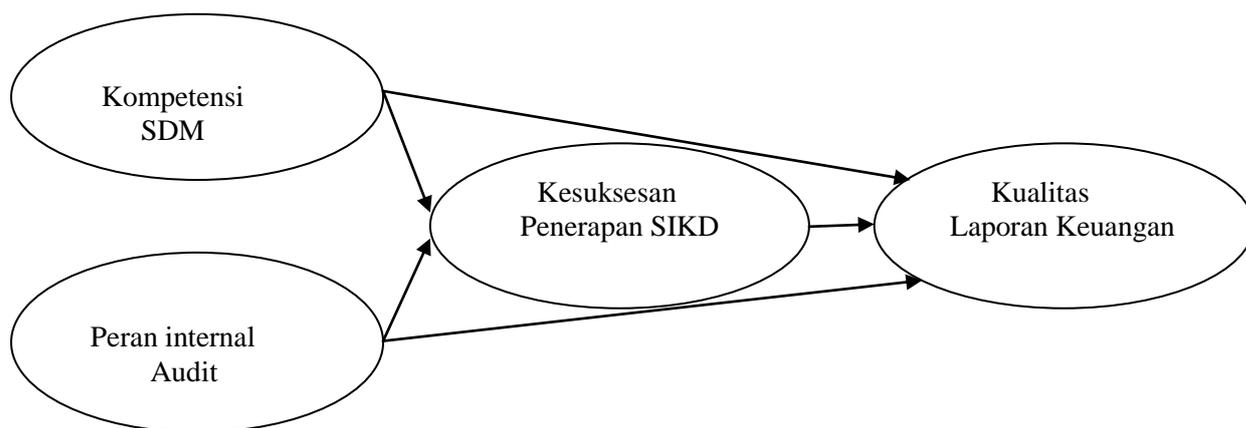
laporan keuangan. Sehingga kecurangan dan masalah akan lebih mudah ditemui terdeteksi.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 3 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Sukrisno Agoes (2006:11) untuk mencapai tujuan perusahaan maka internal auditor harus melakukan beberapa kegiatan dan salah satu nya adalah menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian Intern (SPI), dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Penelitian (Nazaruddin dan Syahrial, 2017) yang berjudul Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Lhoksumawe menunjukkan peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Dari uraian di atas, keterkaitan antar variabel yang satu dengan yang lain dapat digambarkan dengan kerangka konseptual seperti dibawah ini:



Gambar II-3
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan tersebut sebelumnya telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
2. Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5. Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
6. Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan.

7. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
8. Kompetensi Sumber daya Manusia dan Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel berupa angka-angka yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit terhadap kualitas laporan keuangan dengan Kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah sebagai variabel Intervening.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di 34 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota seProvinsi Sumatera Utara yang terdiri 1 Provinsi dan 33 Kabupaten/kota.

Tabel III-1
Tempat Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota	No	Nama Kabupaten/Kota
1	Provinsi Sumatera Utara	18	Kabupaten Padang Lawas Utara
2	Kabupaten Asahan	19	Kabupaten Pakpak Bharat
3	Kabupaten Batubara	20	Kabupaten Samosir
4	Kabupaten Dairi	21	Kabupaten Serdang Bedagai
5	Kabupaten Deli Serdang	22	Kabupaten Simalungun
6	Kabupaten Humbang Hansudutan	23	Kabupaten Tapanuli Selatan
7	Kabupaten Karo	24	Kabupaten Tapanuli Tengah
8	Kabupaten Labuhan Batu	25	Kabupaten Tapanuli Utara
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	26	Kabupaten Toba Samosir
10	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	27	Kota Binjai
11	Kabupaten Langkat	28	Kota Gunung Sitoli
12	Kabupaten Mandailing Natal	29	Kota Medan
13	Kabupaten Nias	30	Kota Padangsidimpuan
14	Kabupaten Nias Barat	31	Kota Pematangsiantar
15	Kabupaten Nias Selatan	32	Kota Sibolga
16	Kabupaten Nias Utara	33	Kota Tanjung Balai
17	Kabupaten Padang Lawas	34	Kota Tebing Tinggi

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini pada Desember 2018 sampai Maret 2018.

Tabel III-2
Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian	Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Riset Pendahuluan	■															
Pengajuan Judul		■	■													
Bimbingan dan seminar proposal				■	■	■	■									
Pengumpulan dan Pengolahan									■	■	■	■				
Bimbingan tesis dan Seminar hasil													■	■	■	
Sidang thesis																■

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Pemerintah Provinsi dan 33 Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sumatera Utara.

2. Sampel Penelitian

Jenis teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasinya relatif kecil, yaitu sebanyak 34 pemerintah daerah, sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel.

D. Defenisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen, Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Peran Internal Audit (X2) sebagai variabel Independen, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai variabel Intervening (Y1).

Tabel III-3
Variabel Operasional, Indikator dan Skala

Jenis variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kualitas Laporan Keuangan (Y) (PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP).	Relevan	Interval
		Andal	Interval
		Dapat di bandingkan	Interval
		Dapat di pahami	Interval
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁) (Keputusan Kepala BKN No. 46A tahun 2007)	Kemampuan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional (Keputusan Kepala BKN No. 46A tahun 2007)	Pengetahuan	Interval
		Keterampilan	Interval

		Sikap	Interval
Peran Internal Audit (X2) Boyton <i>et. al.</i> , (2001)	Rule of conduct yang melukiskan norma-norma perilaku (behaviour norms) yang diharapkan dari auditor intern. Rule of conduct membantu menginterpretasikan prinsip-prinsip kedalam aplikasi praktis dan bermaksud untuk mengarahkan tingkah laku etis (ethical conduct) dari auditor intern	Integritas	Interval
		Obyektifitas	Interval
		Kerahasiaan	Interval
		Kompetensi	Interval
Kesuksesan penerapan sistem Informasi Keuangan Daerah (Y1) DeLone dan Mclean (1992), (2003)	sebuah pengumpulan data dan prosedur pengolahan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan para pemakainya. Menurut Romney et al (2012:30)	Kualitas sistem (System Quality)	Interval
		Kualitas Layanan (Service Qaulity)	Interval
		Kepuasan pemakai (user satisfaction)	Interval
		Kualitas informasi (Quality Information)	Interval

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder nya diambil dari IHPS Semester 1 2018 BPK-RI. Data Primer yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Inspektorat Daerah di tiap Kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

Skala yang dipakai dalam penyusunan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian sebagai berikut:

Tabel III-4
Bobot Skala Likert

Kategori Pertanyaan / Pernyataan	Skala Likert
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Cukup Setuju (CS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2010:93)

Sebelum melakukan pengumpulan data, seluruh kuesioner harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrument, dimana sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang akan diukurinya.

a. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Tabel III-5
Hasil Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	Butir 1	0,565	0,338	Valid
2	Butir 2	0,486	0,338	Valid
3	Butir 3	0,565	0,338	Valid
4	Butir 4	0,486	0,338	Valid
5	Butir 5	0,797	0,338	Valid
6	Butir 6	0,385	0,338	Valid
7	Butir 7	0,565	0,338	Valid
8	Butir 8	0,797	0,338	Valid

Berdasarkan tabel III-5 di atas maka dapat diketahui bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk menguji variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan jumlah pertanyaan delapan (8) butir dinyatakan valid. Hasil ini dibuktikan dengan Rhitung > Rtabel.

b. Variabel Peran Internal Audit (X2)

Tabel III-6
Hasil Validitas variabel Peran Internal Audit

No	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	Butir 1	0,507	0,338	Valid
2	Butir 2	0,797	0,338	Valid
3	Butir 3	0,429	0,338	Valid
4	Butir 4	0,840	0,338	Valid
5	Butir 5	0,613	0,338	Valid
6	Butir 6	0,626	0,338	Valid
7	Butir 7	0,844	0,338	Valid
8	Butir 8	0,736	0,338	Valid
9	Butir 9	0,348	0,338	Valid
10	Butir 10	0,793	0,338	Valid
11	Butir 11	0,428	0,338	Valid
12	Butir 12	0,844	0,338	Valid
13	Butir 13	0,832	0,338	Valid
14	Butir 14	0,381	0,338	Valid
15	Butir 15	0,529	0,338	Valid

Berdasarkan tabel III-6 di atas maka dapat diketahui bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk menguji variabel Peran Internal Audit (X2) dengan jumlah pertanyaan lima belas (15) butir dinyatakan valid. Hasil ini dibuktikan dengan $R_{hitung} > R_{tabel}$.

c. Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Y1)

Tabel III-7
Hasil Validitas Variabel Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

No	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	Butir 1	0,524	0,338	Valid
2	Butir 2	0,630	0,338	Valid
3	Butir 3	0,558	0,338	Valid
4	Butir 4	0,524	0,338	Valid
5	Butir 5	0,630	0,338	Valid
6	Butir 6	0,558	0,338	Valid
7	Butir 7	0,639	0,338	Valid
8	Butir 8	0,555	0,338	Valid
9	Butir 9	0,525	0,338	Valid
10	Butir 10	0,627	0,338	Valid
11	Butir 11	0,555	0,338	Valid
12	Butir 12	0,354	0,338	Valid
13	Butir 13	0,489	0,338	Valid
14	Butir 14	0,373	0,338	Valid
15	Butir 15	0,611	0,338	Valid

Berdasarkan tabel III-7 di atas maka dapat diketahui bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk menguji variabel Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Y1) dengan jumlah pertanyaan lima belas (15) butir dinyatakan valid. Hasil ini dibuktikan dengan $R_{hitung} > R_{tabel}$.

d. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y2)

Tabel III-8
Hasil validitas variabel Kualitas Laporan Keuangan

No	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1	Butir 1	0,822	0,338	Valid

2	Butir 2	0,754	0,338	Valid
3	Butir 3	0,691	0,338	Valid
4	Butir 4	0,523	0,338	Valid
5	Butir 5	0,547	0,338	Valid
6	Butir 6	0,522	0,338	Valid
7	Butir 7	0,393	0,338	Valid
8	Butir 8	0,541	0,338	Valid
9	Butir 9	0,349	0,338	Valid
10	Butir 10	0,755	0,338	Valid
11	Butir 11	0,691	0,338	Valid
12	Butir 12	0,579	0,338	Valid
13	Butir 13	0,735	0,338	Valid
14	Butir 14	0,760	0,338	Valid
15	Butir 15	0,368	0,338	Valid

Berdasarkan tabel III-8 di atas maka dapat diketahui bahwa butir pertanyaan yang digunakan untuk menguji variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y2) dengan jumlah pertanyaan lima belas (15) butir dinyatakan valid. Hasil ini dibuktikan dengan $R_{hitung} > R_{tabel}$.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang mempunyai validitas. Instrumen penelitian ini menggunakan teknik Cronbach Alpha (α) dengan bantuan SPSS. Cronbach Alpha menafsirkan korelasi antar skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Jika nilai koefisien alpha $> 0,60$ maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel. Berikut hasil uji reabilitas ada pada tabel III-9 dibawah ini :

Tabel III-9
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Pertanyaan	Keterangan
Kualitas LK	0,810	15	Reliable
Kompetensi SDM	0,930	8	Reliable
Peran Internal Audit	0,882	15	Reliable
Kesuksesan Penerapan SIKD	0,924	15	Reliable

F. Tehnik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Melalui uji ini diharapkan didapatnya kepastian dipenuhinya syarat normalitas yang akan menjamin dapat dipertanggungjawabkannya langkah-langkah analisis statistik sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh (Ghozali, 2011):

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar menjauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola pada distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik Deskriptif

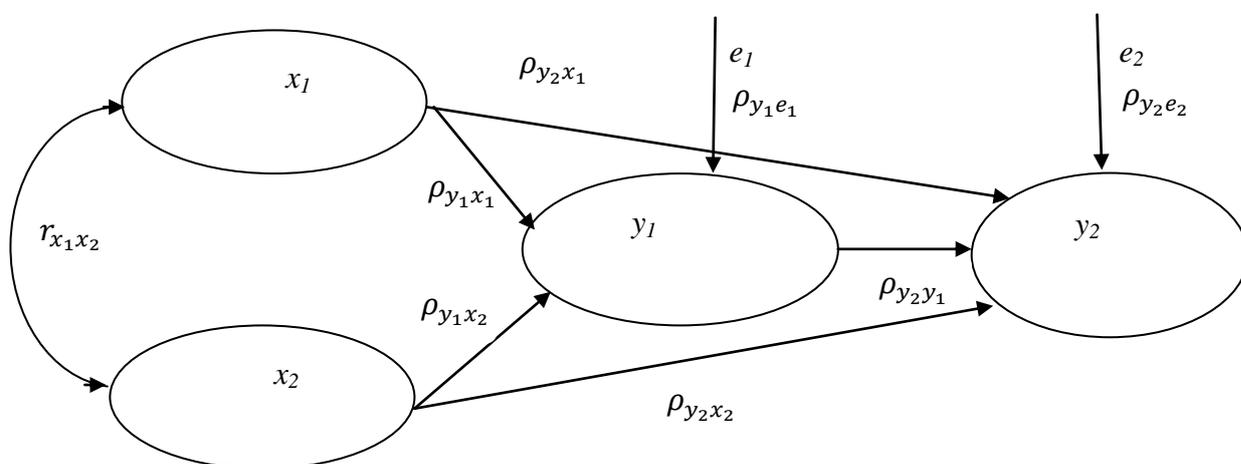
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari semua variabel.

3. Analisis Jalur (Path Analysis)

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan *path analysis*. *Path analysis* merupakan teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda apabila variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat baik secara langsung maupun tidak langsung (Rutherford & Choe, 1993).

a. Persamaan Struktur dan diagram Jalur

Langkah awal penerapan model analisis jalur adalah merumuskan persamaan struktural dan diagram jalur. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan pengaruh antarvariabel yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. Pengaruh langsung adalah pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi tanpa melalui variabel endogen lain, sedang pengaruh tidak langsung adalah pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi melalui variabel endogen lain yang terdapat dalam satu model kausalitas yang sedang dianalisis. Pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Adapun model diagram jalur penelitian ini berdasarkan paradigma hubungan antar-variabel adalah sebagai berikut:



Gambar III-1
Hubungan Struktural Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

Keterangan:

- x_1 = Kompetensi SDM
 x_2 = Peran Internal Audit
 y_1 = Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah
 y_2 = Kualitas Laporan Keuangan
 e_1 = Merupakan variabel lain yang mempengaruhi Kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah tetapi tidak diteliti
 e_2 = Merupakan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tetapi tidak diteliti
 $\rho_{y_1x_1}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel x_1 terhadap y_1
 $\rho_{y_1x_2}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel x_2 terhadap y_1
 $\rho_{y_2x_1}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel x_1 terhadap y_2
 $\rho_{y_2x_2}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel x_2 terhadap y_2
 $\rho_{y_2y_1}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel y_1 terhadap y_2
 $\rho_{y_1e_1}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel lain yang mempengaruhi variabel y_1
 $\rho_{y_2e_2}$ = Merupakan koefisien jalur dari variabel lain yang mempengaruhi variabel y_2

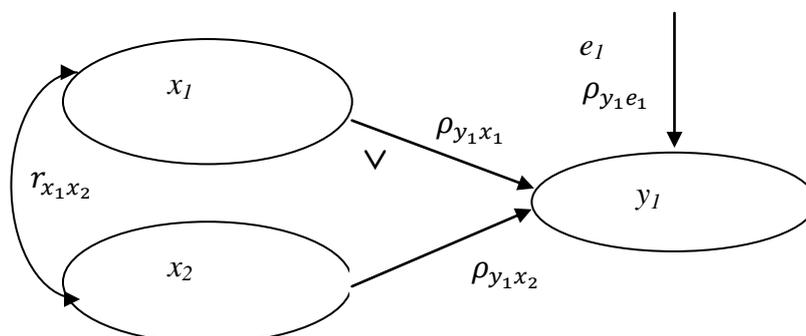
Paradigma hubungan struktural antar variabel terdiri dari dua substruktur:

Sub-struktur 1:

Sub-struktur pertama mengidentifikasi pengaruh variabel Kompetensi SDM (x_1), Peran Internal Audit (x_2) terhadap Kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah (y_1). Pengaruh variabel ditentukan melalui koefisien jalur, seperti tertulis dalam persamaan struktural sebagai berikut:

$$y_1 = \rho_{y_1x_1}x_1 + \rho_{y_1x_2}x_2 + \rho_{y_1e_1}$$

Keterkaitan antar variabel dari persamaan di atas dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar III-2
Sub-struktur 1. Pengaruh Kompetensi SDM, Peran Internal Audit terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Uji hipotesis untuk pengaruh dari variabel x_1 dan x_2 terhadap variabel y_1 dilakukan dengan menguji hipotesis berikut:

$$H_0 : \rho_{y_1 x_i} = 0, y_1 \text{ tidak dipengaruhi variabel } x_i$$

$$H_1 : \rho_{y_1 x_i} > 0, y_1 \text{ dipengaruhi oleh variabel } x_i$$

Sedangkan untuk hubungan pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total dapat dilihat pada tabel III-10. berikut ini :

Tabel III-10
Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Kompetensi SDM, Peran Internal Audit terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pengaruh Variabel	Pengaruh			Total
	Langsung	tidak langsung		
		melalui x_1	melalui x_2	
x_1 terhadap y_1	(a)		(c)	(a)+(c) = (e)
x_2 terhadap y_1	(b)	(d)		(b)+(d) = (f)
Pengaruh secara simultan				(e)+(f) = (g)
Pengaruh variabel luar				1-(g)

Keterangan:

$$(a) = \rho_{y_1 x_1} \cdot \rho_{y_1 x_1}$$

$$(b) = \rho_{y_1 x_2} \cdot \rho_{y_1 x_2}$$

$$(c) = \rho_{y_1 x_1} \cdot r_{x_1 x_2} \cdot \rho_{y_1 x_2}$$

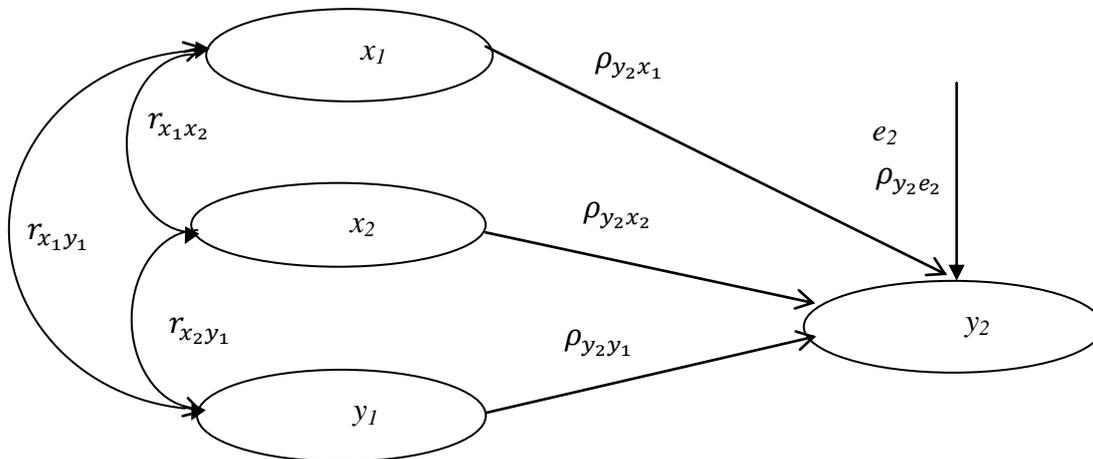
$$(d) = \rho_{y_1 x_2} \cdot r_{x_1 x_2} \cdot \rho_{y_1 x_1}$$

Sub-struktur 2:

Sub-struktur kedua mengidentifikasi pengaruh variabel Kompetensi SDM (x_1), Peran Internal Audit (x_2) dan Kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah (y_1) terhadap kualitas laporan keuangan (y_2). Pengaruh variabel ditentukan melalui koefisien jalur, seperti tertulis dalam persamaan struktural sebagai berikut:

$$y_2 = \rho_{y_2x_1}x_1 + \rho_{y_2x_2}x_2 + \rho_{y_2y_1}y_1 + \rho_{y_2e_2}$$

Keterkaitan antar variabel dari persamaan ini dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :



Gambar III-3
Sub-struktur 2. Pengaruh Kompetensi SDM, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Uji hipotesis untuk pengaruh dari variabel x_1, x_2, y_1 terhadap variabel y_2 dilakukan dengan menguji hipotesis berikut:

$H_0 : \rho_{y_2x_i} = 0$, y_2 tidak dipengaruhi variabel x_i

$H_1 : \rho_{y_2x_i} > 0$, y_2 dipengaruhi oleh variabel x_i

dimana $i = 1, 2$

$H_0 : \rho_{y_2y_1} = 0$, y_2 tidak dipengaruhi variabel y_1

$H_1 : \rho_{y_2y_1} > 0$, y_2 dipengaruhi oleh variabel y_1

Sedangkan untuk hubungan pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total dapat dilihat pada tabel III-4. berikut ini.

Tabel III-11
Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Kompetensi SDM, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Variabel	Pengaruh				Total
	langsung	tidak langsung			
		melalui x_1	melalui x_2	melalui y_1	
x_1 terhadap y_2	(a)		(d)	(e)	(a)+(d)+(e) =(j)
x_2 terhadap y_2	(b)	(f)		(g)	(b)+(f)+(g) =(k)
y_1 terhadap y_2	(c)	(h)	(i)		(c)+(h)+(i) =(l)
Pengaruh secara simultan					(j)+(k)+(l)=(m)
Pengaruh variabel luar					1-(m)

Keterangan:

- (a) = $\rho_{y_2x_1} \cdot \rho_{y_2x_1}$
- (b) = $\rho_{y_2x_2} \cdot \rho_{y_2x_2}$
- (c) = $\rho_{y_2y_1} \cdot \rho_{y_2y_1}$
- (d) = $\rho_{y_2x_1} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_2x_2}$
- (e) = $\rho_{y_2x_1} \cdot r_{x_1y_1} \cdot \rho_{y_2y_1}$
- (f) = $\rho_{y_2x_2} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_2x_1}$
- (g) = $\rho_{y_2x_2} \cdot r_{x_2y_1} \cdot \rho_{y_2y_1}$
- (h) = $\rho_{y_2y_1} \cdot r_{x_1y_1} \cdot \rho_{y_2x_1}$
- (i) = $\rho_{y_2y_1} \cdot r_{x_2y_1} \cdot \rho_{y_2x_2}$

G. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini dapat di uji dengan tiga pengujian yaitu Uji t dan uji f.

1. Uji t (Parsial)

Pengujian t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut: H0

ditolak jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ H_0 diterima jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ Tingkat kepercayaan adalah 95% ($\alpha = 0,05$)

2. Uji F (Simultan)

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut: H_0 ditolak jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ H_0 diterima jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ Tingkat kepercayaan adalah 95% ($\alpha = 0,05$)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kab/kota dan Pemerintah Provinsi di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari pulau sumatera yang merupakan pulau ketiga yang terbesar dan terluas di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km².

Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten/kota, 325 Kecamatan dan 5.456 kelurahan/desa. Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Penelitian ini dilakukan pada 33 Kabupaten/kota dan 1 provinsi Sumatera Utara dengan total objek penelitian sebanyak 34 tempat.

Tabel IV-1
Pemerintah Provinsi dan Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Kabupaten/Kota	No	Nama Kabupaten/Kota
1	Provinsi Sumatera Utara	18	Kabupaten Padang Lawas Utara
2	Kabupaten Asahan	19	Kabupaten Pakpak Bharat
3	Kabupaten Batubara	20	Kabupaten Samosir
4	Kabupaten Dairi	21	Kabupaten Serdang Bedagai
5	Kabupaten Deli Serdang	22	Kabupaten Simalungun
6	Kabupaten Humbang Hansudutan	23	Kabupaten Tapanuli Selatan
7	Kabupaten Karo	24	Kabupaten Tapanuli Tengah
8	Kabupaten Labuhan Batu	25	Kabupaten Tapanuli Utara
9	Kabupaten Labuhan Batu Utara	26	Kabupaten Toba Samosir
10	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	27	Kota Binjai
11	Kabupaten Langkat	28	Kota Gunung Sitoli
12	Kabupaten Mandailing Natal	29	Kota Medan
13	Kabupaten Nias	30	Kota Padangsidimpuan
14	Kabupaten Nias Barat	31	Kota Pematangsiantar
15	Kabupaten Nias Selatan	32	Kota Sibolga
16	Kabupaten Nias Utara	33	Kota Tanjung Balai
17	Kabupaten Padang Lawas	34	Kota Tebing Tinggi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah pada pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan responden nya adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah / Kepala Bidang Akuntansi selaku unit yang memiliki fungsi dalam penyusunan laporan keuangan Pemda dan Inspektur/Irban selaku unit yang memiliki fungsi sebagai aparatur pengawas internal pemerintah dalam hal pengawasan laporan keuangan daerah.

2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mendistribusikan dan mengumpulkan kuesioner yang disebar pada Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Utara dengan mengunjungi langsung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Selain itu pengumpulan kuesioner tersebut juga dilakukan melalui media online dengan instrument google form. Tingkat Pengembalian Kuesioner disajikan pada table berikut ini :

Tabel IV-2
Rakapitulasi Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Unit Analisis	Jumlah Kuesioner disebar		Jumlah Kuesioner kembali		Pengembalian	
		Entitas	Responden	Entitas	Responden	Entitas	Responden
1	BPKAD	34	34	34	34	100	100%
2	INSPEKTORAT	34	34	34	34	100	100%
	Total	68	68	68	68	100	100%

Sumber data : Diolah

Berdasarkan tabel diatas tempat penyebaran kuesioner meliputi 34 kab/kota dengan jumlah responden sebanyak 68 kuesioner dengan pengembalian kuesioner sebesar 100%. Karakteristik responden dalam pengisian kuesioner ini meliputi :

Usia, Jenis Kelamin, Latar Belakang Pendidikan, masa kerja, lama menjabat dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel IV-3
Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	43	63,23 %
	Perempuan	25	36,77 %
	Tidak Ada Informasi	-	0,00 %
Usia	< 35 Tahun	-	0,00 %
	35-40 Tahun	7	10,29 %
	41-45 Tahun	22	32,35 %
	46-50 Tahun	36	52,94 %
	>50 Tahun	3	4,42 %
	Tidak Ada Informasi	-	0,00 %
Jenjang Pendidikan	D3	-	0,00 %
	S1	47	69,11 %
	S2	21	30,89 %
	S3	-	0,00 %
	Tidak Ada Informasi	-	0,00 %
Masa Kerja	< 5 Tahun	-	0,00 %
	5-10 Tahun	4	5,88 %
	11-15 Tahun	13	19,11 %
	16- 20 Tahun	22	32,35 %
	>20 Tahun	29	42,66 %
	Tidak Ada Informasi	-	0,00 %
Masa Kerja Jabatan	< 2 Tahun	11	16,17 %
	2-4 Tahun	29	42,64 %
	5-7 Tahun	24	35,29 %
	>7 Tahun	4	5,90 %
	Tidak Ada Informasi	-	0,00 %

Sumber data : diolah

Berdasarkan tabel di atas, karakteristik responden dapat dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, Sebagian besar jenis kelamin para responden adalah laki-laki dengan jumlah frekuensi 43 atau sekitar 63,23 %. Jika dilihat berdasarkan usia, maka kebanyakan responden berusia 46-50 Tahun dengan jumlah frekuensi 36 atau sekitar 52,94 %. Jika dilihat dari jenjang pendidikan nya maka kebanyakan responden memiliki jenjang pendidikan S1 dengan jumlah frekuensi 47 atau sekitar 69,11 %. Dilihat dari masa kerja nya para lebih banyak

responden memiliki masa kerja di atas 20 tahun dengan jumlah frekuensi 29 atau sekitar 42,66 %. Dan yang terakhir jika dilihat dari masa kerja jabatannya kebanyakan responden memiliki masa jabatan 2- 4 tahun saja dengan frekuensi 29 atau sekitar 42,64 %.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel independen, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit, menggunakan variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan, serta variabel intervening yaitu Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kuisisioner disebar kepada 68 (Enam puluh delapan) responden yang terdiri dari:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan.
- b. Peran Internal Audit terdiri dari 15 (Lima Belas) pertanyaan
- c. Kualitas Laporan Keuangan terdiri dari 15 (Lima Belas) pertanyaan
- d. Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terdiri dari 15 (Lima Belas) pertanyaan.

Prinsip kategori dilakukan menurut (Sugiyono,2010) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga interval kategori yaitu sebagai berikut :

Tabel IV-4
Pedoman kategori Rata-rata Skor Tanggapan Responden

Interval Kuesioner	Interval Penilaian	Kategori
		Tidak memadai/tidak tersedia/Tidak

1,00 – 1,80	0,00 – 20,00	Baik/Tidak Setuju/ Tidak Tepat Waktu
1,81 – 2,60	20,01 – 40,00	Kurang memadai/ Kurang tersedia/ Kurang Baik/ Kurang Setuju/ Kurang Tepat Waktu
2,61 – 3,40	40,01 – 60,00	Cukup memadai/ Cukup tersedia/ Cukup Baik/ Cukup Setuju/ Cukup Tepat Waktu
3,41 – 4,20	60,01 – 80,00	Memadai/Tersedia/Baik/Setuju/Tepat Waktu
4,21 – 5,00	80,01 – 100,0	Sangat Memadai/ Sangat Tersedia/ Sangat Baik/ Sangat Setuju/ Sangat Tepat Waktu

a. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Tanggapan responden mengenai variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia oleh para Kepala BPKAD/Kepala Bidang Akuntansi, Inspektur/Urban untuk seluruh Pemrov dan PemKab/kota di Sumatera Utara. Variabel ini menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap. Tanggapan responden tentang variabel ini dapat dilihat pada tabel IV-5 berikut ini:

Tabel IV-5
Hasil Statistik Deskriptif variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS	Rata-rata Jawaban
1	Saya telah mengerti peran dan fungsi yang jelas dalam pengelolaan keuangan	14	38	16	0	0	3,97
2	Saya menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya	1	19	23	25	0	2,94
3	Saya bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada	5	19	25	19	0	3,15
4	Saya telah mendapatkan pelatihan untuk dapat menunjang kemampuan bekerja dibidang akuntansi	4	29	33	2	0	3,51

5	Saya memahami materi pelatihan yang diberikan	14	18	36	0	0	3,68
6	Materi pelatihan yang Saya ikuti diberikan sesuai dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan	14	30	24	0	0	3,85
7	Saya mematuhi kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil	5	30	33	0	0	3,59
8	Saya menolak intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap aturan	16	30	22	0	0	3,91

Sumber data : Diolah

Berdasarkan Tabel IV-5 di atas, rata-rata maksimum sebesar 3,97 terletak pada Sumber daya Manusia yang sudah mengerti dengan fungsi dan peran nya dalam pengelolaan keuangan. Rata-rata minimum sebesar 2,94 yang terletak pada Sumber Daya Manusia yang menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya. Dalam proses menyusun laporan keuangan, responden lebih setuju bahwa kompetensi sumber daya manusia ditandai dengan mengerti nya para SDM dalam menjalankan peran dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dimengerti dan dipahami serta andal digunakan oleh para penggunanya. Skor minimum yang terletak pada angka 2,94 menyatakan bahwa responden kurang setuju bahwasanya SDM menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia ini menjadi hal yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi berkualitas.

b. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Peran Internal Audit

Tanggapan responden mengenai variabel Peran Internal Audit oleh para Kepala BPKAD/Kepala Bidang Akuntansi, Inspektur/Irban untuk seluruh Pemrov

dan PemKab/kota di Sumatera Utara. Variabel ini menggunakan 4 (empat) indikator yaitu Integritas, Obyektifitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Tanggapan responden tentang variabel ini dapat dilihat pada tabel IV-6 berikut ini :

Tabel IV-6
Hasil Statistik Deskriptif variabel Peran Internal Audit

NO	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Rata rata Jawaban
Integritas							
1	Auditor internal melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh.	4	21	19	24	0	3,07
2	Auditor internal menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.	3	17	21	27	0	2,94
3	Auditor internal mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.	7	17	24	20	0	3,16
4	Auditor internal menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi.	3	23	18	24	0	3,07
5	Auditor internal tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi.	1	18	22	27	0	2,90
6	Auditor internal menggalang kerja sama yang sehat di antara sesama auditor dalam pelaksanaan audit.	5	19	24	20	0	3,13
7	Auditor internal saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.	3	23	18	24	0	3,07
Obyektifitas							
8	Auditor internal mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit.	2	17	21	28	0	2,90
9	Auditor internal tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.	6	17	25	20	0	3,13
10	Auditor internal menolak suatu pemberian dari	5	28	33	2	0	3,53

	auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.						
Kerahasiaan							
11	Auditor internal secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit	13	18	37	0	0	3,65
12	Auditor internal tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	13	30	25	0	0	3,82
Kompetensi							
13	Auditor internal melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit.	11	33	24	0	0	3,81
14	Auditor internal terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.	21	28	19	0	0	4,03
15	Auditor internal menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.	4	29	33	2	0	3,51

Sumber Data : diolah

Berdasarkan tabel IV-6 diatas rata-rata maksimum 4,03 dengan jawaban responden setuju bahwasanya Auditor internal terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan. Dengan demikian seorang auditor dapat lebih teliti dan mahir dalam memeriksa dan mengawasi laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Rata-rata skor minimum dengan nilai 2,90, responden menanggapi Auditor internal tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi dan Auditor internal mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang auditor internal sudah memiliki kode etik yang baik dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dalam

mengawasi laporan keuangan, seorang auditor tidak lagi memiliki kerahasiaan dan lebih integritas dalam melaksanakan tugasnya.

c. Tanggapan Responden Tentang Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Tanggapan responden mengenai variabel Kualitas Laporan Keuangan oleh para Kepala BPKAD/Kepala Bidang Akuntansi, Inspektur/Irban untuk seluruh Pemrov dan PemKab/kota di Sumatera Utara. Variabel ini menggunakan 4 (empat) indikator yaitu Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat dipahami. Tanggapan responden tentang variabel ini dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel IV-7
Hasil Statistik Deskriptif variabel Kualitas Laporan Keuangan

NO	Pernyataan	SS	S	CS	TS	STS	Rata rata Jawaban
	Relevan						
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	9	30	26	1	2	3,63
2	Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna dimasa lalu (feedback value).	5	29	34	0	0	3,57
3	Informasi dalam Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (predictive value).	12	33	22	1	0	3,82
4	Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.	10	32	26	0	0	3,76
5	Informasi dalam laporan keuangan dibuat secara lengkap yaitu mencakup	7	27	34	0	0	3,60

	semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.						
	Andal						
6	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.	13	32	23	0	0	3,85
7	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.	2	14	28	24	0	2,91
8	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.	4	7	31	26	0	2,84
9	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah.	3	14	31	20	0	3,00
10	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.	3	15	26	24	0	2,96
	Dapat Dibandingkan						
11	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	5	11	28	24	0	2,96
12	Dalam penyusunan laporan keuangan, instansi/lembaga tempat saya bekerja telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan	3	14	31	20	0	3,00
13	Instansi/lembaga tempat saya bekerja selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang	14	18	36	0	0	3,68

	sama dari tahun ke tahun.						
	Dapat Dipahami						
14	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.	22	27	19	0	0	4,04
15	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	6	28	34	0	0	3,59

Sumber Data : Diolah

Berdasarkan tabel IV-7 di atas rata-rata maksimum jatuh pada nilai 4,04 dengan tanggapan responden setuju dengan Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Dan nilai rata-rata minimum jatuh pada nilai 2,84 dengan tanggapan responden cukup setuju dengan Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator yang lebih mendukung yaitu dapat dipahami. Dengan dapat dipahaminya laporan keuangan maka semua para pengguna dapat mengkonsumsi laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

d. Tanggapan Responden Tentang Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tanggapan responden mengenai variabel Kualitas Laporan Keuangan oleh para Kepala BPKAD/Kepala Bidang Akuntansi, Inspektur/Urban untuk seluruh Pemrov dan PemKab/kota di Sumatera Utara. Variabel ini menggunakan 4 (empat) indikator yaitu Kualitas Sistem, Kualitas layanan, Kualitas Informasi, dan

Kepuasan Pemakai. Tanggapan responden tentang variabel ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel IV-8
Hasil Statistik Deskriptif variabel Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

No	Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS	Rata-rata jawaban
Kualitas Sistem							
1	Sistem informasi keuangan yang digunakan dapat mengalami hal-hal yang tidak diharapkan yang membuat saya menjadi lebih sulit dalam melaksanakan pekerjaan	29	24	15	0	0	4,21
2	Sistem informasi keuangan yang digunakan dengan mudah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi	12	27	23	4	2	3,63
3	Sistem informasi keuangan yang digunakan terintegrasi dengan aktifitas yang lain yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah	18	28	19	2	1	3,88
4	Sistem informasi keuangan daerah adalah merupakan salah satu prasarana yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah	23	25	13	4	3	3,90
Kualitas Layanan							
5	Sistem Informasi Akuntansi yang ada sering kali memerlukan waktu yang lama untuk berkomunikasi dan menanggapi permintaan	10	30	21	3	4	3,57
6	Saya selalu merasa aman melakukan pekerjaan dengan fasilitas yang diberikan oleh sistem informasi akuntansi	17	29	21	1	0	3,91

7	Saya memiliki keyakinan bahwa sistem informasi akuntansi yang ada memberikan layanan sesuai dengan janjinya	17	34	17	0	0	4,00
8	Sistem Informasi akuntansi yang ada memberikan perhatian secara individual kepada saya	6	19	22	9	12	2,97
Kepuasan Pemakai							
9	Saya memiliki banyak waktu untuk menyesuaikan tugas-tugas saya dengan sistem informasi yang tersedia	10	27	22	5	4	3,50
10	Saya tidak merasa bosan dan nyaman dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dengan menggunakan sistem informasi keuangan	22	18	19	6	3	3,74
11	Saya merasa sistem informasi keuangan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan dalam bekerja	11	16	26	7	8	3,22
12	Sistem informasi keuangan yang digunakan memberikan manfaat bagi saya dalam menyelesaikan pekerjaan	16	19	23	3	7	3,50
Kualitas Informasi							
13	Sistem informasi keuangan menghasilkan informasi yang akurat dan lengkap	23	29	8	4	4	3,93
14	Sistem informasi keuangan menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu	19	19	24	2	4	3,69
15	Sistem Informasi keuangan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam bekerja	35	20	6	2	5	4,15

Sumber data : diolah

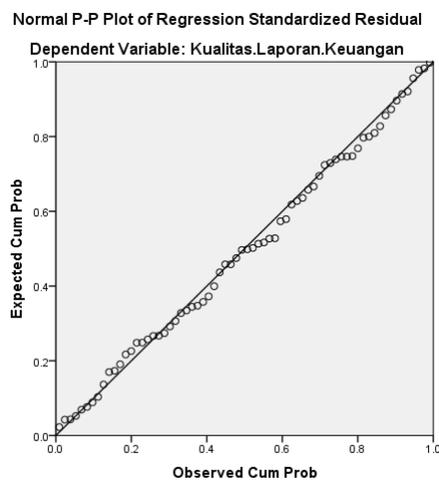
Berdasarkan tabel IV-8 diatas maka dapat dilihat nilai-rata-rata maksimum sebesar 4,21 dengan tanggapan responden sangat setuju dengan Sistem informasi keuangan yang digunakan dapat mengalami hal-hal yang tidak diharapkan yang membuat saya menjadi lebih sulit dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam nilai rata-rata minimum jatuh pada nilai 2,97 tanggapan responden cukup setuju dengan Sistem Informasi akuntansi yang ada memberikan perhatian secara individual kepada penggunanya. Dalam variabel ini, indikator yang memiliki pengaruh yaitu kualitas sistem nya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dalam kesuksesan penerqapan sistem informasi akuntansi dapat dikatakan sukses jika sistem yang digunakan dapat berkualitas sehingga data-data yang d input juga akan mengoutput hasil yang berkualitas pula.

4. Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Pengujian normalitas data penelitian ini menggunakan analisis grafik. Analisis grafik untuk melihat normalitas dilakukan dengan melihat kurva normal *probability plot*. Berikut adalah gambar grafik normal *probability plot*.

Grafik IV-1
Grafik Normal P-Plot



Pada gambar IV-1, terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal maka variabel dependen (integritas laporan keuangan) memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang akan dijelaskan dalam penelitian ini terdiri atas jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian. Hasil pengolahan data analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV-9
Statistik Deskriptif

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	53.66	58.43	55.82	1.056	68
Residual	-13.526	15.211	.000	6.719	68
Std. Predicted Value	-2.048	2.472	.000	1.000	68
Std. Residual	-1.983	2.230	.000	.985	68

c. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh mediasi dari suatu model penelitian melalui variabel perantara di mana pada penelitian ini adalah Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pada penelitian ini, analisis jalur dilakukan pada 2 bentuk sub-struktur. Hasil analisis jalur yang dilakukan pada sub-struktur I ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel IV-10
Hasil Analisis Jalur *R Square* Regresi Sub-struktur 1
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.155 ^a	.024	-.006	6.822

a. Predictors: (Constant), Peran.Internal.Audit, Kompetensi.SDM

b. Dependent Variable:

Kesuksesan.Penerapan.Sistem.Informasi.Keuangan

Tabel IV-11
Hasil Analisis Jalur *Coefficients* Regresi Sub-struktur 1
Coefficients^a

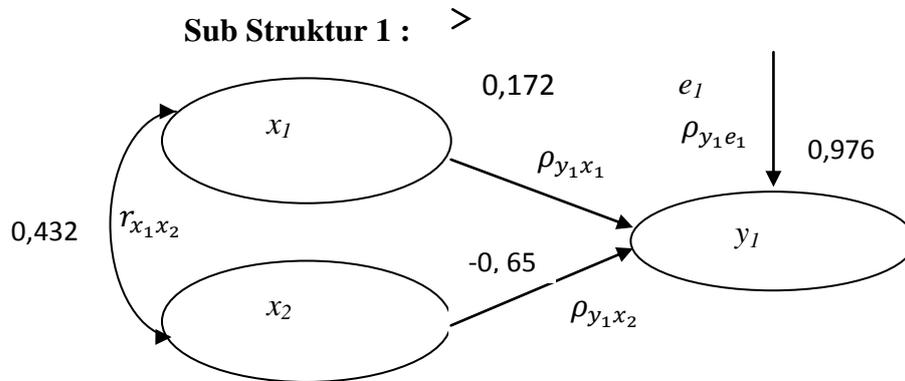
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	48.573	7.315		6.640	.000
	Kompetensi.SDM	.342	.271	.172	1.265	.210
	Peran.Internal.Audit	-.051	.107	-.065	-.479	.634

a. Dependent Variable: Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Dari tabel *Coefficients* di atas (pada kolom *Standardized Coefficients*) terlihat nilai-nilai koefisien regresinya adalah:

- Koefisien x_1 adalah $\rho_{y_1x_1} = -0,172$ selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 1.

- Koefisien x_2 adalah $\rho_{y_1x_2} = -0.65$ selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 1.



Gambar IV-1.

Sub-struktur 1. Pengaruh Kompetensi SDM, Peran Internal Audit terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Dari gambar di atas terlihat besarnya hubungan antar variabel. Model persamaannya adalah : $y_1 = 0,172x_1 + -0,065x_2 + 0,976$

Untuk hubungan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total Kompetensi SDM dan Peran Internal Audit terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dihitung sebagai berikut :

$$(e) = \rho_{y_1x_1} \cdot \rho_{y_1x_1} = 0,172 \cdot 0,172 = 0,029$$

$$(f) = \rho_{y_1x_2} \cdot \rho_{y_1x_2} = -0,065 \cdot -0,065 = 0,004$$

$$(g) = \rho_{y_1x_1} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_1x_2} = 0,172 \cdot 0,432 \cdot -0,065 = -0,004$$

$$(h) = \rho_{y_1x_2} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_1x_1} = -0,065 \cdot 0,432 \cdot 0,172 = -0,004$$

Hasil perhitungan di atas dirangkum pada tabel IV-12 berikut :

Tabel IV-12
pengaruh langsung, tidak langsung, pengaruh total Kompetensi SDM dan Peran Internal Audit terhadap Kesuksesan Penerapan SIKD

Pengaruh Variabel	Pengaruh			Total
	Langsung	tidak langsung		
		melalui x_1	melalui x_2	
x_1 terhadap y_1	0,029		-0,004	$0,029 + -0,004 = 0,025$
x_2 terhadap y_1	0,004	-0,004		$0,004 + -0,004 = 0$
Pengaruh secara simultan				$0,025 + 0 = 0,025$
Pengaruh variabel luar				$1 - 0,025 = 0,975$

Sumber data : diolah

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil pengaruh *Kompetensi SDM dan Peran Internal Audit* secara simultan terhadap Kesuksesan Penerapan SIKD adalah sebesar 0.025 atau merupakan nilai R^2 yang diperoleh dari *model summary* yang dihasilkan oleh SPSS. Mengacu pada output regresi sub struktur 1 pada bagian tabel coefficient diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi nya dari kedua variabel yaitu $x_1 = 0,210$ dan $x_2 = 0,634$ lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi sub struktur 1 yakni x_1 dan x_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap y_1 . Kecilnya nilai R^2 atau R^2 yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,024, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh x_1 dan x_2 terhadap y_1 adalah sebesar 2,4 % sementara sisanya 97,6 % merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Sub Struktur 2 :

Hasil analisis jalur yang dilakukan pada sub-struktur 2 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel IV-13
Hasil Analisis Jalur R^2 Regresi Sub-struktur 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553 ^a	.306	.273	5.678

a. Predictors: (Constant),

Kesuksesan.Penerapan.Sistem.Informasi.Keuangan,
 Peran.Internal.Audit, Kompetensi.SDM

b. Dependent Variable: Kualitas.Laporan.Keuangan

Tabel IV-14
Hasil Analisis Jalur *Coefficients* Regresi Sub-struktur 2

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.786	7.888		1.875	.065
	Kompetensi.SDM	.489	.228	.251	2.145	.036
	Peran.Internal.Audit	.275	.089	.357	3.082	.003
	Kesuksesan.Penerapan.Sistem.Informasi.Keluangan	.157	.103	.161	1.525	.132

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

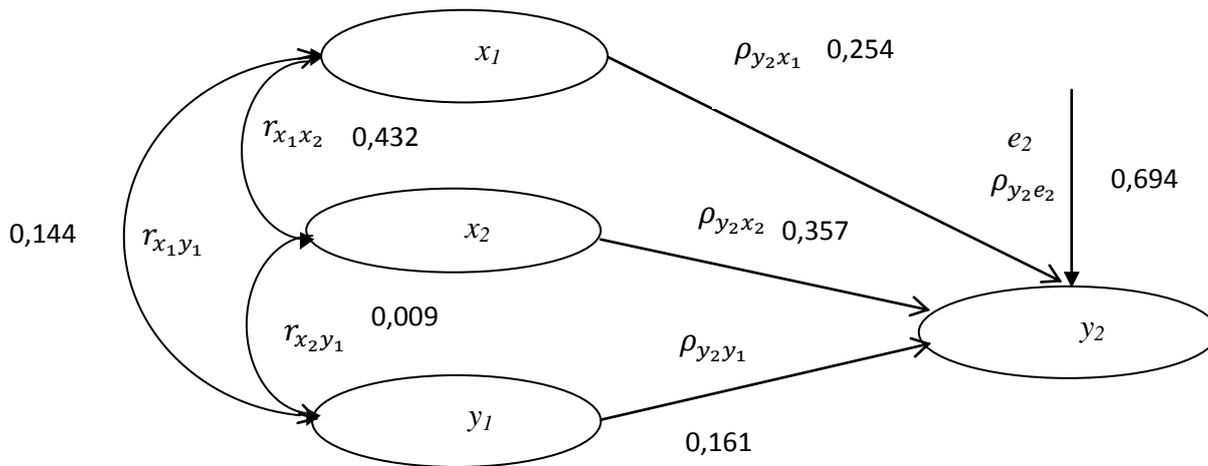
Dari tabel *Coefficients* di atas (pada kolom *Standardized Coefficients*) terlihat nilai-nilai koefisien regresinya adalah:

- Koefisien x_1 adalah $\rho_{y_2x_1} = 0.251$ selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 2.
- Koefisien x_2 adalah $\rho_{y_2x_2} = -0.357$ selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 2.
- Koefisien y_1 adalah $\rho_{y_2y_1} = 0,161$ selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 2.

Pengaruh variabel ditentukan melalui koefisien jalur, seperti tertulis dalam persamaan struktural sebagai berikut :

$$y_2 = 0.251x_1 + 0,357x_2 + 0,161y_1$$

Koefisien-koefisien dan korelasi yang telah diperoleh pada analisis korelasi sebelumnya di atas dimasukkan ke dalam diagram analisis jalur sub-struktur 2 sebagai berikut:



Gambar IV-2
Sub-struktur 2. Pengaruh Kompetensi SDM, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Keterangan:

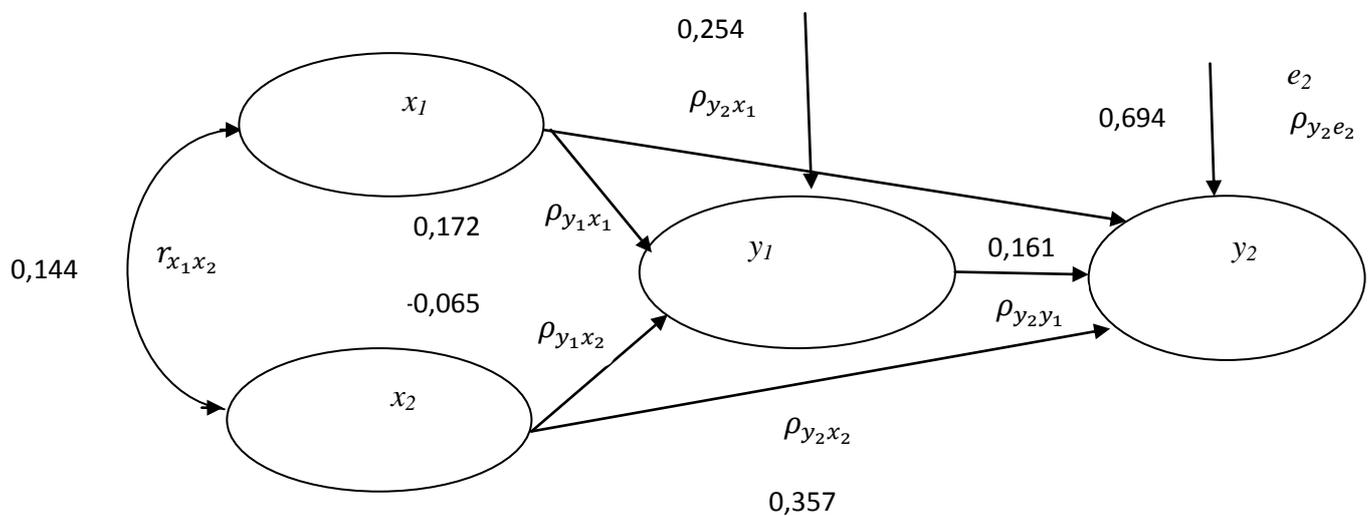
- (j) $= \rho_{y_2x_1} \cdot \rho_{y_2x_1} = 0,254 \cdot 0,254 = 0,064$
(k) $= \rho_{y_2x_2} \cdot \rho_{y_2x_2} = 0,357 \cdot 0,357 = 0,127$
(l) $= \rho_{y_2y_1} \cdot \rho_{y_2y_1} = 0,161 \cdot 0,161 = 0,025$
(m) $= \rho_{y_2x_1} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_2x_2} = 0,254 \cdot 0,432 \cdot 0,009 = 0,0009$
(n) $= \rho_{y_2x_1} \cdot r_{x_1y_1} \cdot \rho_{y_2y_1} = 0,254 \cdot 0,144 \cdot 0,161 = 0,005$
(o) $= \rho_{y_2x_2} \cdot r_{x_1x_2} \cdot \rho_{y_2x_1} = 0,357 \cdot 0,432 \cdot 0,254 = 0,039$
(p) $= \rho_{y_2x_2} \cdot r_{x_2y_1} \cdot \rho_{y_2y_1} = 0,357 \cdot 0,009 \cdot 0,161 = 0,0005$
(q) $= \rho_{y_2y_1} \cdot r_{x_1y_1} \cdot \rho_{y_2x_1} = 0,161 \cdot 0,144 \cdot 0,254 = 0,005$
(r) $= \rho_{y_2y_1} \cdot r_{x_2y_1} \cdot \rho_{y_2x_2} = 0,161 \cdot 0,009 \cdot 0,357 = 0,0005$

Tabel IV-15
Rumusan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Kompetensi SDM, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Variabel	Pengaruh				Total
	langsung	tidak langsung			
		melalui x_1	melalui x_2	melalui y_1	
x_1 terhadap y_2	0,064		0,0009	0,005	$(0,064)+(0,0009)+(0,005) = (0,0699)$
x_2 terhadap y_2	0,127	0,039		0,0005	$(0,127)+(0,039)+(0,0005) = (0,1665)$
y_1 terhadap y_2	0,025	0,005	0,0005		$(0,025)+(0,005)+(0,0005) = (0,0305)$
Pengaruh secara simultan					$(0,0699)+(0,1665)+(0,0305) = (0,2669)$
Pengaruh variabel luar					$1-(0,2669) = 0,7331$

Berdasarkan output regresi sub struktur II di atas pada tabel coefficient, diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu $x_1 = 0,036$, $x_2 = 0,003$ lebih kecil dari $0,05$.Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi sub struktur II yakni variabel x_1 dan x_2 berpengaruh signifikan terhadap y_2 . Sementara nilai signifikan dari $y_1 = 0,132$ lebih besar dari $0,05$. Dan besarnya nilai signifikan y_1 dari pada $0,05$ memberikan kesimpulan bahwa y_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap y_2 . Besarnya nilai R^2 atau R^2 yang terdapat dalam tabel model summary adalah sebesar $0,306$ atau $30,6\%$ sementara sisanya $69,4\%$ yang merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Adapun model diagram jalur penelitian ini berdasarkan paradigma hubungan antar-variabel adalah sebagai berikut :



Gambar IV-3
Hubungan Struktural Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

5. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Koefisien Analisis Jalur (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh secara parsial variabel independen yaitu *Kompetensi SDM*, *Peran Internal Audit* terhadap variabel dependen (Kesuksesan Penerapan SIKD) yang dirumuskan dengan hipotesis berikut:

$H_0 : \rho_{y_1x_i} = 0$, y_1 tidak dipengaruhi variabel x_i

$H_1 : \rho_{y_1x_i} > 0$, y_1 dipengaruhi oleh variabel x_i

dimana $i = 1, 2, 3$

Tabel IV-16
Hasil Uji t Regresi Sub-struktur 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	48.573	7.315		6.640	.000
Kompetensi.SDM	.342	.271	.172	1.265	.210
Peran.Internal.Audit	-.051	.107	-.065	-.479	.634

a. Dependent Variable: Kesuksesan.Penerapan.Sistem.Informasi.Kuangan

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

1. Variabel x_1 memiliki nilai t hitung sebesar $1.265 < t$ tabel sebesar 1.668 dengan tingkat signifikan sebesar 0,210 lebih besar dari 0,05 sehingga menerima H_0 dan menolak H_1 . Ini berarti tidak ada pengaruh variabel Kompetensi SDM terhadap Kesuksesan Penerapan SIKD.
2. Variabel x_2 memiliki nilai t hitung sebesar $-479 < t$ tabel sebesar 1.668 dengan tingkat signifikan sebesar 0,634 lebih besar dari 0,05 sehingga menerima H_0 dan menolak H_1 . Ini berarti tidak ada pengaruh variabel Peran Internal Audit Terhadap Kesuksesan penerapan SIKD.

Tabel IV-17
Hasil Uji t Regresi Sub-struktur 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.786	7.888		1.875	.065
Kompetensi.SDM	.489	.228	.251	2.145	.036
Peran.Internal.Audit	.275	.089	.357	3.082	.003
Kesuksesan.Penerapan.Sistem.Informasi.Keuangan	.157	.103	.161	1.525	.132

a. Dependent Variable: Kualitas.Laporan.Keuangan

Berdasarkan tabel diatas dapat di peroleh hasil pengujian sebagai berikut :

1. Variabel x1 memiliki nilai t hitung $2.145 > t$ tabel 1.668 dengan tingkat signifikan $0,036$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 . Ini berarti bahwa ada pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Variabel x2 memiliki nilai t hitung $3.082 > t$ tabel 1.668 dengan tingkat signifikan $0,003$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 . Ini berarti bahwa ada pengaruh variabel Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
3. Variabel y1 memiliki nilai t hitung $1.525 < t$ tabel 1.668 dengan tingkat signifikansi $0,132$ lebih besar $0,5$ sehingga menolak H_1 dan menerima H_0 . Ini berarti bahwa tidak ada pengaruh Kesuksesan SIKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Untuk mengevaluasi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan) pada model analisis jalur digunakan uji F.

Tabel IV-18
Hasil Uji F Regresi Sub-struktur 1

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	74.739	2	37.370	.803	.452 ^b
Residual	3025.143	65	46.541		
Total	3099.882	67			

a. Dependent Variable: Kesuksesan.Penerapan.Sistem.Informasi.Keuangan

b. Predictors: (Constant), Peran.Internal.Audit, Kompetensi.SDM

Untuk menguji hubungan secara simultan antara variabel x_1 dan x_2 terhadap y_1 menggunakan uji kelinieran persamaan regresi seperti yang ditunjukkan pada tabel IV-17 di atas. Berdasarkan tabel IV-17 diperoleh nilai f hitung sebesar $0,803 < f$ tabel sebesar 3,14 dan signifikansi $0,452 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas (*Kompetensi SDM dan Peran Internal Audit*) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (*Kesuksesan Penerapan SIKD*) atau menolak H_1 .

Tabel IV-19
Hasil Uji F Regresi Sub-struktur 2

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	908.589	3	302.863	9.393	.000 ^b
Residual	2063.529	64	32.243		
Total	2972.118	67			

a. Dependent Variable: Kualitas.Laporan.Keuangan

b. Predictors: (Constant),
Kesesuksesan.Penerapan.Sistem.Informasi.Kuangan, Peran.Internal.Audit,
Kompetensi.SDM

Untuk menguji hubungan secara simultan antara variabel x_1 , x_2 dan y_1 terhadap y_2 menggunakan uji kelinieran persamaan regresi seperti yang ditunjukkan pada tabel IV-19 di atas. Berdasarkan tabel IV-19 diperoleh nilai f hitung sebesar $9.393 > f$ tabel sebesar 3.14 dan signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kompetensi SDM, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan SIKD berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (Kualitas laporan keuangan) atau menerima H_1 .

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian terhadap kesesuaian teori, pendapatan, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal – hal tersebut. Berikut ini hasil pembahasan dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dari output SPSS di atas mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah diperoleh uji hipotesis secara parsial yang menunjukkan bahwa nilai t hitung kompetensi sumber daya manusia sebesar $1,265$ dan t tabel sebesar $1,668$ dengan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian t hitung lebih kecil dari t tabel. Nilai signifikansi $0,210$ (lebih besar dari $0,05$) artinya H_0 di terima dan H_1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi

sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini berarti keterlibatan para aparatur negara dengan sistem informasi yang tersedia tidak membuat para aparatur negara menjadi lebih berkompeten dalam hal pengelolaan laporan keuangan, hal ini dilihat dari hasil tanggapan responden pada variabel kompetensi sumber daya manusia yang lebih banyak menyetujui perihal telah mengertinya para aparatur negara tentang peran dan fungsi yang jelas dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga membuat sistem informasi yang disediakan oleh para pemerintah kabupaten seperti SIMDA BPKP tidak meningkatkan nilai kompetensi para aparatur negara dalam mengelola laporan keuangannya.

Dalam tanggapan responden, ada sebanyak 38 orang yang sudah mengerti peran dan fungsinya sebagai ASN yang mengelola laporan keuangan, sehingga tersedianya sistem informasi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh kepada para aparatur negara.

Pada tanggapan responden yang lain yang menyetujui tentang lengkapnya materi yang diberikan pada saat pelatihan yang diikuti oleh para aparatur negara karena materi yang disediakan diberikan sesuai dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan sehingga dalam hal pengelolaan keuangan mereka sudah mengerti mengoperasikan sistem.

Seperti kita ketahui bahwa kompetensi itu menurut keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang

dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Nah dari pengertian di atas sejalan dengan pendapat para responden yang menyatakan sudah mendapatkan pelatihan yang sesuai dan sudah mengerti dengan peran dan fungsi masing-masing sehingga adanya sebuah sistem tidak mempengaruhi dalam mengelola laporan keuangan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian (Nunuy :2009), (Mahdavi dan Funnel, 2003) yang menyatakan Aparatur Negara berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan sistem informasi akuntansi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lilis Wijayanti (2017) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap teknologi informasi. Hal ini dikarenakan sudah mengerti dan pahami nya para paratur dalam mengelola laporan keuangan.

2. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dari output SPSS di atas mengenai pengaruh peran internal audit terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah diperoleh uji hipotesis secara parsial yang menunjukkan bahwa nilai t hitung peran internal audit sebesar $-0,479$ dan t tabel sebesar $1,668$ dengan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian t hitung lebih kecil dari t tabel. Nilai signifikansi $0,634$ (lebih besar dari $0,05$) artinya H_0 di terima dan H_1 ditolak. Hail ini menunjukkan

bahwa secara parsial peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh kesimpulan bahwa peran internal audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini berarti adanya pengawasan yang dilakukan oleh internal audit tidak memiliki kontribusi terhadap adanya sistem informasi keuangan pada beberapa kabupaten di Sumatera Utara.

Sesuai dengan tanggapan responden mengenai peran internal audit, diperoleh tanggapan responden sebanyak 40,3% atau sekitar 28 inspektur yang menyetujui bahwasanya auditor internal terus-menerus telah meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaannya.

Di tanggapan lain, responden juga menyetujui dengan jumlah responden sekitar 30 inspektur yang menyetujui bahwasanya Auditor internal tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil tanggapan responden di atas dapat kita simpulkan bahwasanya didalam sebuah sistem informasi, bisa saja sudah diterapkan internal audit dalam sistem informasi keuangan yang digunakan, sehingga para auditor tidak memerlukan sebuah sistem untuk menggali informasi tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para OPD, sehingga penelitian ini menunjukkan peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah.

Dalam sebuah peraturan PER/04/M.PAN/03/2008 yang menyatakan bahwa seorang auditor harus memiliki kode etik yaitu, berintegritas, obyektifitas, kerahasiaan dan berkompetensi. Dengan dimilikinya kode etik dalam peraturan ini maka seorang internal audit itu sudah memiliki keahlian dibidangnya untuk mengawasi para pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangannya. Dalam hal ini sebuah pengawasan bisa saja sudah diterapkan didalam sistem informasi yang digunakan, sehingga peran internal audit tidak memiliki pengaruh terhadap adanya sebuah sistem informasi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Peran Internal Audit tidak berpengaruh Kesuksesan Penerapan SIKD. Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya (Indra et. al. 2014), Penelitian (Nurbaedah, 2009) yang menyatakan Peran internal Audit berpengaruh terhadap efektifitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Asep, 2016) yang memberikan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi keuangan daerah.

3. Pengaruh Kompetensi SDM, Peran internal Audit terhadap Kesuksesan Penerapan SIKD.

Berdasarkan hasil pengujian dari output SPSS di atas mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah diperoleh uji hipotesis secara simultan yang menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 0,803 dan f tabel sebesar 3,14 dengan $\alpha = 5\%$. Dengan demikian f hitung lebih kecil dari f

tabel. Nilai signifikansi 0,452 (lebih besar dari 0,05) artinya H_0 di terima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti, Kompetensi SDM, Peran Internal Audit tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kesuksesan Penerapan SIKD. Hal ini bisa dilihat dari hasil tanggapan responden pada pengaruh masing- masing variabel yang di uji secara parsial yang tidak memiliki pengaruh terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini dijelaskan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden bahwa Aparatur Sipil Negara dan pengawasan yang dilakukan bagian inspektorat tidak sepenuhnya berpatokan dengan SIKD, hal ini dikarenakan Sistem yang sudah tersistem tidak memerlukan banyak tenaga SDM untuk mengolah laporan keuangan, bahkan ada beberapa kantor yang masih kelebihan komputer yang didalam nya sudah terinstal program SIKD, dan sesuai dengan hasil perbincangan peneliti dengan salah satu kepala inspektorat yang menyatakan bahwa pemeriksaannya hanya menggunakan laporan keuangan secara fisik saja, tidak melihat sistem yang digunakan.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu, Penelitian (Nurbaedah, 2009) yang menyatakan Peran Internal audit berpengaruh terhadap Efektifitas penggunaan SIKD. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Asep, 2016) yang memberikan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi keuangan daerah.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil output yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah data melalui SPSS. Hasil Variabel x1 memiliki nilai t hitung $2.145 > t$ tabel 1.668 dengan tingkat signifikansi $0,036$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 . Ini berarti bahwa ada pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Jika dilihat dari tanggapan responden mengenai kompetensi sumber daya manusia, ada sekitar 28 responden yang menyetujui bahwasanya Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Hal ini membuktikan bahwa laporan keuangan yang disediakan oleh pemerintah daerah sudah memiliki nilai kualitas. Dalam mengelola laporan keuangan tidak luput dari pengguna sistem yang menginput dan mengoutput hasilnya, sehingga output yang dikeluarkan itulah sebuah informasi yang dinamakan laporan keuangan. Tersajinya laporan keuangan yang sudah dapat dipahami oleh para penggunanya menunjukkan bahwasanya laporan keuangan tersebut sudah memenuhi salah satu karakteristik berkualitasnya laporan keuangan. Hal ini dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, tentang SAP. Bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah pada paragraf 35 menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dapat *dipahami*.

Sumber Daya Manusia yang berkompeten menjadi salah satu faktor berkualitasnya Laporan Keuangan. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan

(ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Havesi, 2005 dalam Celviana 2010) dalam (Septiana, 2017).

Dalam proses penyiapan dan penyusunan laporan keuangan, pemerintah memerlukan SDM yang berkompeten, menguasai akuntansi pemerintahan (KemenKeu, 2018 : 96).

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, diteliti oleh (Kadek et al, 2015) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan jika kompetensi sumber daya manusia baik maka kualitas laporan keuangan daerah juga akan baik sehingga memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Penelitian (Lilis *et al*, 2016) juga mengatakan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, hal ini dikarenakan kondisi pegawai bagian keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

5. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil output dari program SPSS yang digunakan oleh penulis dalam mengolah data, maka diperoleh nilai variabel x_2 memiliki nilai t hitung $3.082 > t$ tabel 1.668 dengan tingkat signifikan $0,003$ lebih kecil dari $0,05$ sehingga menolak H_0 dan menerima H_1 . Ini berarti bahwa ada pengaruh variabel Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dilihat dari tanggapan responden dengan jumlah responden 28 orang yang menyetujui perihal auditor internal terus-

menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, Sehingga dengan mahirnya seorang auditor pada profesinya maka semakin menguatkan sistem pengawasan pada penyusunan laporan keuangan. Seorang internal auditor yang memiliki kemahiran di bidangnya akan menghasilkan nilai kerja yang efektif, maka dari itu nilai laporan keuangan akan meningkat jika internal auditnya berperan sesuai dengan kode etik nya.

Peran audit internal juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan kualitas laporan keuangan. Alasannya adalah dengan adanya pengawasan dari internal audit maka akan menghasilkan sistem pengendalian yang baik sesuai dengan prosedur, dengan adanya SPI maka penyusunan laporan keuangan menjadi berkualitas.

Mulyadi (2008:177) menyatakan bahwa keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya pengendalian intern akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan.

Menurut Mulyadi (2002:29) audit intern juga memiliki tugas untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi.

Hal ini sejalan dengan Penelitian (Lilis *et al*, 2016) juga menyatakan peran internal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD hal ini dikarenakan Adanya peran internal audit akan dapat membantu pemerintah dalam menyiapkan

laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan handal untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD.

6. Pengaruh Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil output penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan program SPSS maka diperoleh Variabel y1 memiliki nilai t hitung $1.525 <$ dari t tabel 1.668 dengan tingkat signifikansi 0,132 lebih besar 0,5 sehingga menolak H1 dan menerima Ho. Ini berarti bahwa tidak ada pengaruh Kesuksesan SIKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Menanggapi hasil penelitian di atas, maka dapat dilihat dari tanggapan responden dalam mengisi kuesioner yang menyetujui bahwasanya sistem Informasi akuntansi yang ada memberikan perhatian secara individual kepada pengguna sistem saja, dengan jumlah responden 22 orang. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam menyebarkan kuesioner, sebelum adanya sistem informasi, laporan keuangan tetap dapat di susun dengan cara tersistem, dan jika dibandingkan dengan adanya sistem informasi keuangan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah menunjukkan tidak ada pengaruh yang begitu signifikan yang dirasakan oleh para aparatur negara dalam hal mengelola keuangan.

Dalam mengelola laporan keuangan yang berkualitas, memang seharusnya sistem informasi menjadi alat utama yang mendorong berkualitas nya suatu informasi keuangan. Akan tetapi berseberangan dengan hasil penelitian yang di uji oleh penulis bahwasanya Kesuksesan penerapan SIKD tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan.

Hal ini mungkin disebabkan ada bagian-bagian lain yang memiliki pengaruh kuat dalam hal pengelolaan keuangan, yaitu orang yang menginput dan mengoutput data laporan keuangan atau biasa disebut ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sudah memiliki kompetensi sehingga Sistem informasi yang diterapkan tidak begitu mempengaruhi laporan keuangan. Adanya penerapan sistem informasi yang dilakukan oleh tiap pemerintah kabupaten akan tetapi jika pengguna nya tidak berkompeten maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan berkualitas.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang (Silviana, 2014) yang menunjukkan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas LKPD dikarenakan SIKD merupakan sistem yang sudah terintegrasi berdasarkan standart akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan.

7. Pengaruh Kompetensi SDM, Peran internal Audit, Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil output dari data yang dimasukkan ke program SPSS maka diperoleh nilai f hitung sebesar $9.393 > f$ tabel sebesar 3.14 dan signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kompetensi SDM, Peran Internal Audit, Kesuksesan Penerapan SIKD berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (Kualitas laporan keuangan) atau menerima H_1 .

Jika dilihat dari tanggapan para responden mengenai kompeten nya seorang ASN dengan jumlah responden tertinggi sebanyak 30 orang yang menyetujui bahwasanya materi pelatihan yang diikuti oleh para ASN sudah diberikan sesuai

dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan, sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dalam pelatihan. Jika dilihat dari tanggapan responden mengenai peran internal audit dengan jumlah responden tertinggi yaitu sebanyak 28 orang yang menyetujui bahwasanya seorang auditor internal terus-menerus telah meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, sehingga dalam proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap OPD di tiap-tiap kabupaten dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya. Dan jika dilihat dari tanggapan responden mengenai kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah yang memiliki tanggapan responden tertinggi sebanyak 28 orang yang menyetujui perihal sistem Informasi keuangan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam bekerja, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan akuntabel.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia merupakan bagian pertama yang harus diperhatikan, karena yang akan menggunakan dan mengoperasikan sistem yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah manusia. Jika Sumber Daya manusia berkompeten dalam mengoperasikan sistem maka proses penyusunan laporan keuangan akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga penyampaian waktu pelaporan keuangan akan tepat waktu. Begitu juga dengan halnya peran internal audit dan Sistem informasi keuangan, secara teori sangat berpengaruh dikarenakan sebuah sistem mampu menggaikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh para internal audit.

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah menetapkan sistem akuntansi berbasis akrual untuk seluruh pemerintah pusat dan

daerah. Dalam kesuksesan penerapan Akuntansi berbasis akrual, Sumber Daya Manusia merupakan salah satu tantangan yang wajib diperhatikan. SDM yang berkompeten merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Melalui program integrasi sosialisasi/training diharapkan pemangku kepentingan memahami dan mendukung penerapan basis akuntansi akrual dan bersama-sama mengupayakan peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat terwujud. (KemenKeu, 2018 : 84).

Sesuai dengan hasil penelitian ini Kompetensi SDM dan Peran Internal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian (Lilis *et al*, 2016) mengatakan kompetensi dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, hal ini dikarenakan kondisi pegawai bagian keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang (Silviana, 2014) yang menunjukkan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas LKPD dikarenakan SIKD merupakan sistem yang sudah terintegrasi berdasarkan standart akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan.

8. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan melalui program SPSS, maka ditemukan hasil output untuk nilai x_1 terhadap y_2 melalui y_1 sebesar 0,005 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai pengaruh secara langsung dengan nilai 0,064. Hasil ini menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan melalui kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini memang tidak sesuai dengan beberapa teori yang menyatakan bahwasanya untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah melakukan reformasi keuangan negara melalui paket Undang-Undang di bidang keuangan negara agar terlaksananya reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik. Pada tahun 2005, akan tetapi hasil penelitian ini tidak bisa di bantah dikarenakan banyak faktor penyebab tidak berpengaruh nya sistem terhadap kualitas laporan keuangan, hal itu bisa saja dikarenakan SDM yang tidak memiliki kemampuan cukup dalam mengoperasikan sebuah Sistem untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Maka dalam proses pengimplementasian SAP harus didukung dengan adanya serangkaian prosedur secara manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dikerjakan oleh para Aparatur Sipil Negara. Serangkaian prosedur tersebut dikenal dengan nama sistem akuntansi. Salah satu sistem Informasi akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah Sistem Akuntansi berbasis Akrual. Pada tahun 2010 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 untuk menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi

Pemerintahan berbasis akrual, peraturan ini dibuat guna untuk menciptakan keseragaman secara nasional dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga dapat memperkecil perbedaan sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengkonsolidasian data.

Seperti dijelaskan (Wahyono, 2004) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai/andal, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumber daya yang menghasilkannya. Informasi harus dapat dipahami sebagai salah satu indikator berkualitasnya informasi. Mudah dipahami disini menyangkut Sumber Daya Manusia yang menghasilkannya.

Jika pengendalian intern akuntansi dirancang dan diterapkan dengan baik oleh manajemen di dalam pengelolaan organisasinya, maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan akan akan terjamin ketelitian dan keandalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audt terhadap kualitas laporan keuangan dengan kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah menjadi variabel intervening (study pada pemerintah provinsi dan kabupaten /kota se-sumatera utara) adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kesuksesan Penerapan SIKD. Hal ini berarti keterlibatan para aparatur negara dengan sistem informasi yang tersedia tidak membuat para aparatur negara menjadi lebih berkompeten dalam hal pengelolaan laporan keuangan.
2. Peran Internal Audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kesuksesan Penerapan SIKD. Hal ini berarti adanya pengawasan yang dilakukan oleh internal audit tidak memiliki kontribusi terhadap adanya sistem sinformasi keuangan pada beberapa kabupaten di Sumatera Utara.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran internal audit tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah. ini dijelaskan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden bahwa Aparatur Sipil Negara dan pengawasan yang dilakukan bagian inspektorat tidak sepenuhnya berpatokan dengan

SIKD, hal ini dikarenakan Sistem yang sudah tersistem tidak memerlukan banyak tenaga SDM untuk mengolah laporan keuangan, bahkan ada beberapa kantor yang masih kelebihan komputer yang didalamnya sudah terinstal program SIKD, dan sesuai dengan hasil perbincangan peneliti dengan salah satu kepala inspektorat yang menyatakan bahwa pemeriksaannya hanya menggunakan laporan keuangan secara fisik saja, tidak melihat sistem yang digunakan.

4. Kompetensi SDM berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dibuktikan dari tanggapan responden mengenai kompetensi sumber daya manusia, ada sekitar 28 responden yang menyetujui bahwasanya Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Hal ini membuktikan bahwa laporan keuangan yang disediakan oleh pemerintah daerah sudah memiliki nilai kualitas
5. Peran Internal Audit berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dibuktikan dari tanggapan responden dengan jumlah responden 28 orang yang menyetujui perihal auditor internal terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, Sehingga dengan mahirnya seorang auditor pada profesinya maka semakin menguatkan sistem pengawasan pada penyusunan laporan keuangan.
6. Kesuksesan Penerapan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dibuktikan dari tanggapan responden dalam mengisi kuesioner yang menyetujui bahwasanya sistem Informasi akuntansi yang ada memberikan perhatian

secara individual kepada pengguna sistem saja, dengan jumlah responden 22 orang. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam menyebarkan kuesioner, sebelum adanya sistem informasi, laporan keuangan tetap dapat di susun dengan cara tersistem, dan jika dibandingkan dengan adanya sistem informasi keuangan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah menunjukkan tidak ada pengaruh yang begitu signifikan yang dirasakan oleh para aparatur negara dalam hal mengelola keuangan.

7. Kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dari tanggapan para responden mengenai kompeten nya seorang ASN dengan jumlah responden tertinggi sebanyak 30 orang yang menyetujui bahwasanya materi pelatihan yang diikuti oleh para ASN sudah diberikan sesuai dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan, sehingga tidak membutuhkan banyak waktu dalam pelatihan. Jika dilihat dari tanggapan responden mengenai peran internal audit dengan jumlah responden tertinggi yaitu sebanyak 28 orang yang menyetujui bahwasanya seorang auditor internal terus-menerus telah meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan, sehingga dalam proses pemeriksaan dan pengawasan terhadap OPD di tiap-tiap kabupaten dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya. Dan jika dilihat dari tanggapan responden mengenai kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah yang memiliki tanggapan responden tertinggi sebanyak 28 orang yang menyetujui perihal sistem Informasi keuangan menghasilkan informasi yang sesuai dengan

kebutuhan dalam bekerja, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan akuntabel.

8. Kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui kesuksesan penerapan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan lebih besarnya angka pengaruh secara langsung dengan nilai 0,064 dibandingkan dengan nilai pengaruh secara tidak langsung dengan nilai 0,005.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Setiap Pemerintah Kabupaten/kota hendaknya meningkatkan peran pengawas (inspektorat) dalam mengawasi laporan keuangan.
2. Setiap Pemkab meningkatkan pelatihan untuk SDM yang belum memiliki skill dalam hal mengolah laporan keuangan.
3. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dipakai oleh masing-masing pemerintah kabupaten saat ini sudah bisa diterapkan berbasis audit, dengan membuat sistem pengawasan melalui sistem maka dapat mempermudah internal audit dalam mengawasi laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Hendaknya pemerintah menyediakan anggaran untuk pelatihan para Aparatur Sipil Negara sehingga para ASN memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing.
5. Setiap pemerintah kabupaten hendaknya lebih menguatkan SOP agar para ASN dapat bekerja sesuai waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. (2006). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Akmal. 2006. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: Indeks
- Amin Widjaja Tunggal. 2013. *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo.
- Baridwan, Zaki. 2000. *Intermediate Accounting*. Edisi Tujuh. Yogyakarta: BPFE.
- Barry E Cushing, Romney Martha1 D, 2003. *Accounting Information System*. John. Adison Wisley.
- Bodnar H George William S. Hopwood. 2007. *Accounting Information System*. Edisi 9. Terjemahan. Penerbit Andi.
- Bodnar, George, William, Hopwood, 2000, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi pertama, penerjemah, Amir Abadi Jusup dan Rudi M. Tambunan, penerbit salemba empat, Jakarta.
- Boynton, Wiliam C., Johnson, Raymond N & Walter G. Kell., 2001. "Modern Auditing", 7th, Edition, New York : John Wiley & Sons, Inc
- Cohen, Sandra, dan Nikolaos Kaimenakis. 2011. *Assessing Quality of Financial Reporting through Audit Report : The case of Greek Municipalities*. *Global Business and Economic Review*, Vol.13. Nos3/4. pp.187-203.
- Daswirman, Lisa Amelia Herman. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh*. *Jurnal Pundi*. Vol.01.No.02.
- Davis, F.D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*, *MIS Quarterly* 13 September, (pp.319-340).

- DeLone, W.H. and E.R.Mc Lean. 1992. "Information System Success: The Quest for the Dependent Variable" *Information System Research* 3 (March).
- DeLone, W.H. and E.R.Mc Lean. 2003. "The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update" *Journal of Management Information Systems*, Vol. 19, No. 4, pp. 9–30.
- Dwi et.al., Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dengan Pendekatan Model DeLone dan McLean yang Dimodifikasi.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Roneka Cipta.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. "*Statement of Financial Accounting Concepts No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information*". Stamford. Connecticut.
- Gellinas, U.A. Oram & W. Wriggins, 1990. *Accounting Information System*. Boston: PWS-Kent Publishing Company.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guy, Dan M, (2002), *Auditing*, Jilid II, Edisi 5, Penerjemah Sugiyarto, Erlangga: Jakarta.
- Hiro Tugiman. 2006. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- <http://www.bpk.go.id/news/anggota-v-buka-rapat-koordinasi-kegiatan-pemeriksaan-di-lingkungan-auditorat-keuangan-negara-v>
- <http://www.bpk.go.id/news/bpk-selenggarakan-workshop-pemantapan-pemeriksaan-dan-entry-meeting-pemeriksaan-lkpd-tahun-anggaran-2016-untuk-wilayah-indonesia-bagian-timur>
- <http://www.sumutprov.go.id/berita-lainnya/2613-gubsu-erry-motivasi-pemkab-pemko-dapatkan-opini-wtp-terhadap-lkpd>

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. PSA 29 SA Seksi 508. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. "Standar Akuntansi Keuangan". Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018.* (2018) Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Melalui <http://www.bpk.go.id>
- Imam Mulyana. 2010. *Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat
- Intruksi Presiden No 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Negara.
- Ives et al., 1983; Bailey dan Pearson, 1983; Doll dan Torkzadeh, 1988; Seddon dan Yiew, 1992; Mahmood et al. 2000; Doll et al. 2004; Livari, 2004; Landrum dan Prybutok, 2004).
- Jogiyanto. (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kadek et. al.,2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Program S1*. Vol 2. No 1.
- Keputusan Kepala BKN No 46 A Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negri Sipil.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal 2004 Standar Profesi Audit Internal. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad.2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Laudon, Kenneth C., and Jane P. Laudon, 2000."Organization and Technology in The Networked Enterprise"Management Information System, Six Edition, International Edition. www.prenhall.com/laudon.

- Lilis *et.al.*,2016.Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
- M.Yusuf, Asril. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.
- Mahmudi.2003. Study Kasus Sebagai Strategi Riset Untuk Mengembangkan Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol 7 No.1.
- Mardiasmo, 2001. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002 Revisi* , Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. [.\(www.google.com\)](http://www.google.com).
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance* .*Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2: 1. (1-17).
- Markus, M.Lynne, and Mark Keil. 1994. “ If We Build it, They Will Come Designing Information Systems That People Want To Use.” *Sloan Management Review* (Summer).
- Mulyadi, 2002, *Auditing*, Edisi keenam, Cetakan pertama , Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Nawawi, Hadari. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*.Cetakan Keempat.Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazaruddin, Syahril 2017. Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*. Vol 3. No 1.
- Noor. Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian*,Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurmala Sari, Eka. 2018.The Successful Implementation of Accounting Information System and the Quality of Government Financial Statement at Regencies and Cities in Nort Sumatera, Indonesia. *International Business Management*. Volt 12. No.4.
- Nurmala Sari, Eka.2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Budaya Organisasi, Kompetensi, dan Komitmen Organisasional Terhadap Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui <http://www.google.com> .
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010. Tentang Sistem Informasi keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui <http://www.bpkp.go.id>).
- Pertaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pinta Saras Puspita dan Hamzah Ritchi. 2017. Deduksi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone and McLean Pada Implementasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Pitt, L.F, R.T. Watson, and C.B. Kavan. (1995). *Service Quality : A Measure of Information Effectiveness*. MIS Quarterly, (19:2).
- Pujanira, Putriasri. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. (2007). Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (PATH ANALYSIS). Bandung: Alfabeta.
- Safrida et.al. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Banda Aceh. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 03. No.02.
- Sajady, H., Dastgir, M. Dan Nejad, H. Hashem. 2008. Evaluation of The Effectiveness Of Accounting Information Systems. International Journal of Information Science and Technology. Vol 6. No. 2.

- Sawyer's, Lawrence B, Mortimer A. Dittenhofer, & James H. Scheimer. 2003. "Sawyer's Internal Auditing." Fifth Edition. Diterjemahkan Oleh Desi Adhariani. 2005. Audit Internal Sawyer. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Seddon, P., B., and Kiew, M.Y. (1994). *Partial Test and Development of DeLone and McLean's Model of Information Success in DeGross, J.I., Huff, S.L dan Munro, M.C. (eds)*, Proceedings of the fifteenth international conference on information systems, pp.99-110. Vanouwer, Canada.
- Sekaran, uma dan Roger Bougie. (2010). Edisi 5, Research Method For Business: A Skill Building Approach. John Wiley @ Sons, New York.
- Septiana, Lola.2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Intenal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Silviana.2014.Pengaruh Penewrapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat. Vol 6. No 1.
- Syarifudin, Akhmad.2014. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen)*. Jurnal Fokus Bisnis.Vol 14. Nomor 02.
- Siregar, Syofian. 2015. *Statistika Terapan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Sonny,Loho&Sugiyanto,2004.Sistemakuntansipemerintahwww.ksap.orp/Riset&Artikel/Art5.pdf7.
- Sugiyono. 2014.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes. 2004. "Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)", Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Syafruddin. 2006. *Dasar-Dasar Kepelatihan Olahraga*.Padang : FIK UNP
- The Institute of Internal Auditors (IIA). 1999.Standard for the professional Practice Internal Auditing. The IIA Research Foundation, Florida.
- Tugiman, Hiro. 2009, *Standar Profesional Audit Internal dan Auditing*, Yogyakarta, Kanisius.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui <http://www.google.com>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com>

Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Andi. (www.google.com)

Wijayanti, Lilis. 2017. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*.

Yogi, Asep. 2016. Pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.